Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

Dinas Kehutanan

Samarinda, Pebruari 2019

LKjIP 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. 53 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Visi Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2018 adalah

"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN YANG TERPADU DAN BEKELANJUTAN BERSPEKTIF PERUBAHAN IKLIM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN TIMUR "

Sesuai dengan visi tersebut maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 4 (empat) buah misi demi mewujudkan visi tersebut, yaitu : (1) Optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan; (2) Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; (3) Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam rangka meningkatkan persedian carbon hutan; (4) Meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan atau Sekitar Kawasan Hutan;

LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Perencanaan, Pencapaian, dan Realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator

kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana tertuang pada RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2018.

IKU yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra.

Selanjutnya pada RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2018 ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Hasil analisa LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa ke- 4 (empat) sasaran berhasil memenuhi target capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rincian Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan dengan % Capaian indikator sebesar 244,45 %
2. Menurunnya luas kerusakan hutan dengan % Capaian indikator sebesar 100 %
3. Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka dengan % Capaian indikator sebesar 100,06%
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dengan % Capaian indikator sebesar 100 %

Sehingga dapat disimpulkan bawah secara rata-rata pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dikategorikan SANGAT BAIK dengan nilai rata-rata 136,13 %.

Demikian LAKIP ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

H. AMRULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19611214 198703 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i.
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN & DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A Dasar Pembentukan Organisasi	1
B Tugas dan Fungsi	2
C Struktur Organisasi	23
D Sumber Daya Aparatur	26
E Aspek Strategis Organisasi	27
F Permasalahan Utama (Isu Strategis)	28
G Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	38
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	40
A Perencanaan Strategis	40
B Indikator Kinerja Utama	47
C Perjanjian Kinerja	49
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	50
A Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan	50
B Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	54

C Analisis Capaian Kinerja 54
D Realisasi Anggaran 77

BAB. IV 81
PENUTUP

A Kesimpulan 81
B Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan Kinerjanya 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A Indikator Kinerja Utama (IKU)
B Perjanjian Kinerja 2018 dan 2019
C Rencana Aksi ATas Pencapaian Kinerja Tahun 2018
D Rencana Kinerja Tahunan 2018 dan 2019
E Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Provinsi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel Sumber Daya Aparatur 26

Tabel Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Prov. Kaltim 32

Tabel Realisasi Perhutanan Sosial di Kaltim 33

Tabel Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kritisan lahan 34

Tabel Data luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi perkabupaten/ kota tahun 2018 34

Tabel Data sebaran hospot tahun 2016-2018 36

Tabel Tujuan, sasaran, Indikator Sasaran, target Tahunan dan program/kegiatan, serta Penyajian IKU 43

Tabel Program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran 44

Tabel Indikator Kinerja Utama 48

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018 50

Tabel Nilai hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja 50

Tabel Tindak lanjut atas hasil evaluasi inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP 50

Tabel Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (sasaran 1) 54

Tabel Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (sasaran 1) 55

Tabel Membandingkan Realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (sasaran 1) 55

Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja alternative solusi (sasaran 1) 55

Tabel Analisis Program/Kegiatan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja (sasaran 1) 56

Tabel Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya (sasaran 1) 58

Tabel Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (sasaran 2) 59

Tabel Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (sasaran 2) 60

Tabel Membandingkan Realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (sasaran 2) 60

Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja alternative solusi (sasaran 2) 61

Tabel Analisis Program/Kegiatan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja (sasaran 2) 61

Tabel Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya (sasaran 2) 63

Tabel Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (sasaran 3) 64

Tabel Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (sasaran 3) 64

Tabel Membandingkan Realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (sasaran 3) 65

Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja alternative solusi (sasaran 3) 65

Tabel Analisis Program/Kegiatan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja (sasaran 3) 66

Tabel Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya (sasaran 3) 69

Tabel Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (sasaran 4) 69

Tabel Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (sasaran 4) 69

Tabel Membandingkan Realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (sasaran 4) 70

Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja alternative solusi (sasaran 4) 70

Tabel Analisis Program/Kegiatan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja (sasaran 4) 74

Tabel Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya (sasaran 4) 77

Tabel Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja 77

Tabel Realisasi anggaran per program dan kegiatan 78

DAFTAR BAGAN

		Halaman
Bagan 1	Struktur Organisasi Dinas	24
Bagan 1	Struktur Organisasi UPTD	25

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1	UPTD KPHP/L di Provinsi Kalimantan Timur	31
Bagan 1	Luas Penyebaran lahan kritis Provinsi Kalimantan Timur	34
Bagan 1	Grafik Jumlah sebaran titik Panas di Prov. Kaltim Tahun 2011 s/d 2015	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dasar pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Kehutanan di bantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Pergub tersebut dinyatakan bahwa terdapat 9 (Sembilan) UPTD Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
9. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

B. TUGAS DAN FUNGSI

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Pergub tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan KPHP dan KPHL; rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di provinsi, yaitu meliputi : perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
d. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
e. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

f. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;

g. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, serta Kepala UPTD Dinas Kehutanan. Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016. Sesuai dengan Pergub tersebut, masing-masing tugas pokok dari jabatan struktural di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok meyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Koordinasi rencana program dan anggaran;
b. Pengelolaan data dan informasi;
c. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara; dan

d. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan program mempunyai tugas melakukan Koordinasi dan Pengumpulan bahan Perumusan kebijakan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketataleksanaan, pemeliharaan, hukum, kehumasan, pengaduan masyarakat dan pelaporan.
c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akutansi keuangan, pengelolaan aset dan pelaporan.

2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan (kecuali KPHK) serta pemanfaatan hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan

evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;

c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;

d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;

f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;

h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;

i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;

j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri

primer hasil hutan bukan kayu; dan

k. Penyiapan penyelesaian sanksi terhadap pelanggaran administratif dibidang kehutanan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan membawahi Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
   b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
   c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
   d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,

pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

b. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan; dan
d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.

3. Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m^3/tahun, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
   b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
   c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
   d. Menyiapkan data dan bahan dugaan pelanggaran dan penyelesaiannya terhadap pelanggaran administratif usaha bidang kehutanan; dan

e. Menyiapkan bahan pengenaan sanksi administratif pelanggaran usaha di bidang kehutanan.

4. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mempunyai tugas pokok :

a. Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan perlindungan hutan di HL dan HP; perlindungan,pengawetandan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES; pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

b. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
2. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi

Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan

4. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya membawahi Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
   b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi; dan
   c. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi.

2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan,

pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;

b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;

c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;

d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi; dan

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota;

b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam Provinsi;

c. Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi; dan

d. Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem

penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara dan melaksanakan evaluasi mitigasi iklim dan emisi gas rumah kaca urusan kehutanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
2. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
3. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
4. Menyusun standar, criteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait

kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;

5. Melaksanakan koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahi Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Seksi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan dan Seksi Pembenihan Tanaman Hutan. Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
   b. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
   c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
   d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem infromasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi.

2. Seksi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabiltasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
   b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui

penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan

d. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi.

e. Menyiapkan bahan penyusunan standar, criteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH.

f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.

3. Seksi Pembenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi; dan

b. Menyiapkan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi

6. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial dan promosi mitigasi iklim. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;
d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
e. Melaksanakan promosi upaya upaya mitigasi iklim pada urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan membawahi Seksi Penyuluhan Kehutanan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat. Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Seksi Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas :

2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akutansi keuangan serta pengelolaan aset;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala uptd sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi, Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi;
2. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi; dan
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan produksi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Perlindungan KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistemserta pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan produksi;
2. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan produksi; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada instansi, lembaga atau perusahaaan dimana dalam menjalin kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Begitu juga dengan instansi pemerintah dalam hal ini pada level Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki struktur organisasi yang terbangun guna pencapaian terhadap tujuan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan pelayananan dan tugas kepemerintahan dimana struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 tahun 2008.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 9 (sembilan) Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

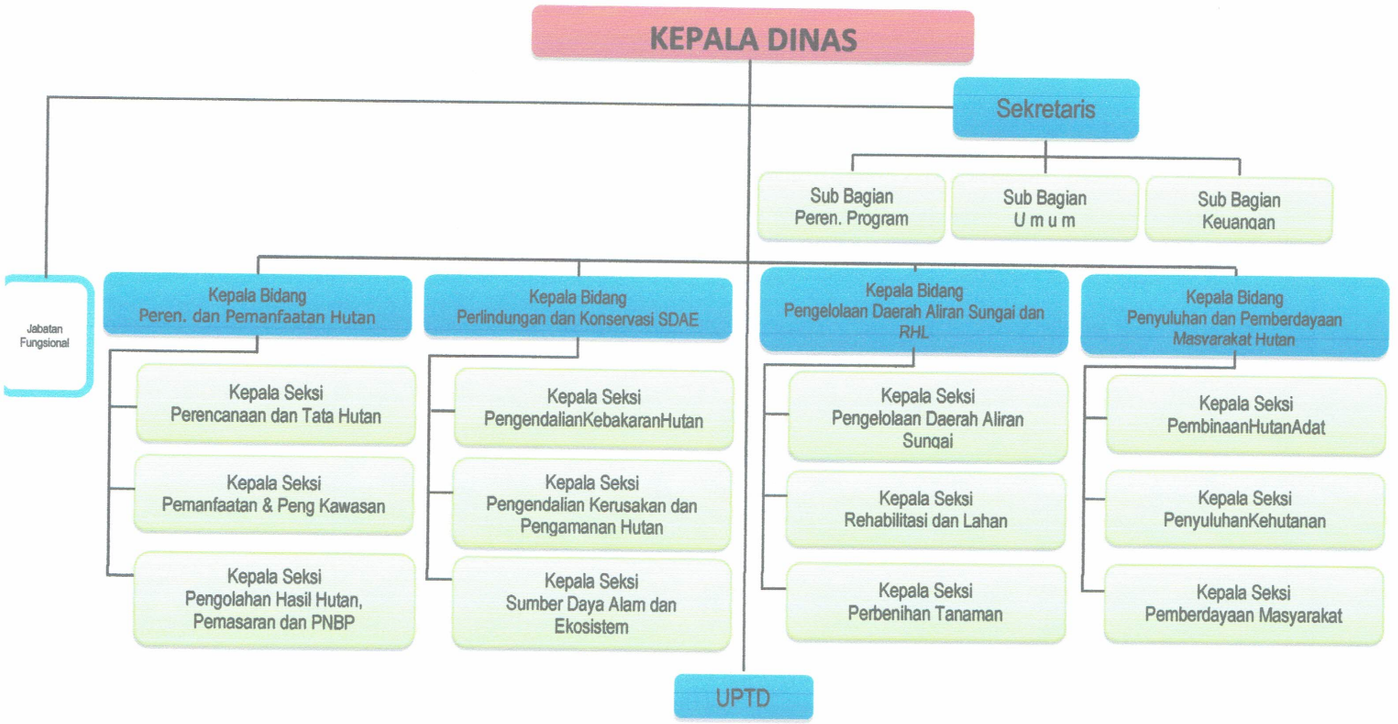

BAGAN 1 . STRUKTUR ORGANISASI DINAS

BAGAN 2 . STRUKTUR ORGANISASI UPTD

D. SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2018 memiliki jumlah pegawai sebanyak 798 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

SDM aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 8,54% berpendidikan S2; 39,25% berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 9,48%; 39,65 % berpendidikan SLTA dan 2,27% berpendidikan SLTP serta1, 0,8% berpendidikan SD.

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur	3	1	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur	12	1	8	5	-	-	8	5	-	-	-	-
	Pelaksana Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur	120	28	5	115	27	1	4	64	4	71	5	-
2	Kepala UPTD KPHP Batu Ayau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Ayau	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Batu Ayau	61	14	-	58	18	-	5	40	6	24	-	-
3	Kepala UPTD KPHP Bengalon	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bengalon	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bengalon	40	17	-	44	13	-	3	32	4	18	2	-
4	Kepala UPTD KPHP Berau Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTDKPHP Berau Barat	2	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Barat	54	8	-	45	23	2	1	13	11	31	5	1
5	Kepala UPTD KPHP Bongan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bongan	1	2	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bongan	36	5	2	36	3	1	-	7	-	29	2	1
6	Kepala UPTD KPHP DAS Belayan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP DAS Belayan	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP DAS Belayan	108	27	7	84	46	1	7	52	18	55	2	1
7	Kepala UPTD KPHP Kendilo	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Kendilo	3	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Kendilo	22	4	-	24	3	1	1	11	1	12	-	1

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
8	Kepala UPTD KPHP Meratus	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Meratus	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Meratus	29	5	1	23	9	1	2	13	10	8	-	1
9	Kepala UPTD KPHP Santan	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Santan	3	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Santan	56	8	-	49	15	-	6	20	6	31	1	-
10	Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD Tahura Bukit Soeharto	3	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD Tahura Bukit Soeharto	42	11	-	36	16	1	3	20	11	18	-	1
JUMLAH		**616**	**133**	**50**	**520**	**171**	**8**	**64**	**294**	**71**	**297**	**17**	**6**
JUMLAH PNS		**749**											

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

   Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

   Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah Pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. selama kurun waktu tertentu Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima

   Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Kehutanan Kaltim maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang

diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah :

1. **Belum optimalnya perencanaan dan pemanfaatan hutan yang menyebabkan banyak potensi hasil hutan belum tertangani dengan baik.**

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat banyak. Yang paling menonjol saat ini adalah pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam dan tanaman. Salah satu kontribusinya adalah sebagai penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kami merasa apa yang sudah dilakukan masih bisa ditingkatkan. Banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan dimasa depan untuk memaksimalkan potensi hutan.

Dengan tetap mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan PNBP tahun-tahun sebelumnya, kami melihat beberapa berpeluang yang bisa meningkatkan potensi hasil hutan. Pertama, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kayu. Oleh beberapa kalangan PNBP dari pemanenan kayu dianggap belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Masih banyak kayu-kayu utamanya dari hutan alam yang belum dibayarkan PSDH dan DR nya. Terutama kayu-kayu hasil land clearing di areal pinjam pakai kawasan hutan dan di areal konversi. Kayu hasil penebangan tersebut dengan alasan tertentu sengaja tidak di LHP-kan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam laporannya memprediksi hilangnya potensi PNBP kayu mencapai Rp. 5,24 –7,24 trilyun per tahun selama 12 tahun periode kajian (2003-2014). Meskipun besaran angka kerugian masih bisa diperdebatkan, tapi yang perlu menjadi perhatianadalah bagaimana menyusun program dan kegiatan yang mampu menyelamatkan asset-aset negara tersebut.

Kedua, **pemanfaatan limbah kayu hasil pemanenan di hutan dan pengolahan di industri**. Sebuah fakta, bahwa kegiatan penebangan pohon dan pengolahannya menghasilkan limbah yang cukup

besar. Hal ini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian, dengan variasi prosentase limbah yang dihasilkan. Kondisi ini idealnya mampu menjadi pendorong untuk memperkuat program yang berorientasi menuju pengolahan limbah kayu menjadi produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah. Termasuk juga dalam penatausahaan kayu limbah pemanenan tersebut. Hal ini menjadi selaras dengan kebijakan pemanfaatan limbah kayu sebagaimana tertuang di dalam rancangan peraturan daerah masterplan perubahan iklim di Kalimantan Timur.

Ketiga, **mengembangkan potensi hutan lainnya selain kayu**. Selama ini kepopuleran kayu belum mampu diikuti oleh hasil hutan lainnya, seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mensejajarkan potensi hutan selain kayu dengan kayu saat ini. Apalagi jika yang menjadi standar acuannya adalah besarnya kontribusi dalam PNBP.

Kami menyadari bahwa dengan semakin tidak memberikan perhatian kepada hal ini, akan membuat potensinya semakin jauh tertinggal dari kayu. Disatu sisi, pembahasan, diskusi, dan penelitian di tingkat regional, provinsi, dan bahkan internasional perihal pemanfaatan hutan bukan kayu sudah jauh berkembang jauh. Apalagi jika dikaitkan dengan peran hutan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut membuat kami perlu memberikan perhatian yang lebih dalam bentuk program dan kegiatan terkait. Namun, tetap harus rasional dalam menetapkan target-target di dalam RENSTRA.

Keempat, **memaksimalkan peran unit pengelola hutan tingkat tapak.** Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki 20 (dua puluh) organisasi pemerintah tingkat tapak (lapangan) berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Gambar 1 UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur

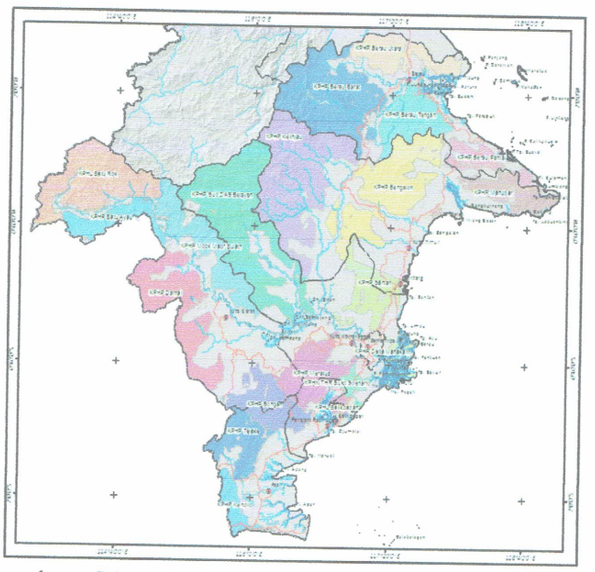

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (2018)

KPH diharapkan bisa menjalankan peran manajerial atas wilayah hutannya. Tidak seperti yang selama ini telah terjadi.Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) cenderung menjalankan fungsi administrasi perijinan pemanfaatan hutan saja. Ini pada gilirannya melemahkan sistem pengamanan aset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Dikarenakan sepenuhnya kepada pelaku usaha, sedangkan untuk areal-areal yang tidak berijin menjadi *open access*.

Namun demikian, kami masih harus bersabar untuk melihat KPH tersebut menjadi organisasi yang mandiri. Organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN atau APBD. Sebaliknya mampu mengelola, mengusahakan dan menghasilkan pendapatan dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi berupa kayu, non-kayu dan jasa lingkungan. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah mendesak yang segera ditindak lanjuti. Seperti penataan kembali SDM-SDM yang ada, paska beralihnya status kepegawaian SDM Kehutanan dari pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai provinsi. Lebih dari sebagian tersebut saat ini ditempatkan di KPH. Hal lainnya adalah adalah percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka

Panjang (RPHJP) untuk beberapa KPH. Segera menyusul pembuatan dokumen-dokumen lainnya seperti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJP), dan pembuatan rencana bisnis. Hal-hal di atas harus dilaksanakan ditengah kondisi dukungan penganggaran (APBD) bagi KPH yang terbatas. Selain itu cara pandang tidak sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) kami (yang ada di provinsi dan KPH) yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan KPH).

2. **Belum optimalnya pemahaman masyarakat disekitar hutan terhadap program-program pembangunan sektor kehutanan yang dapat memberdayakan masyarakat.**

Program perhutanan sosial dan kemitraan sesungguhnya bukan merupakan program baru. Dari 12,7 juta hektar target pemerintah dalam RPJM tahun 2015-2019, seluas 660.782 hektar alokasi lahan untuk program ini ada di Provinsi Kalimantan Timur, seperti tabel 3 di bawah ini.

Tabel 1 Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten	HL	HP	HPK	HPT	20% Kemitraan	Jumlah
1	Balikpapan	1.867				780	2.646
2	Berau	7.877	48.319	5.568	2.292	61.032	125.087
3	Kutai Barat	11.842	14.409		19.449	28.388	74.088
4	Kutai Kartanegara	3.348	59.089	1.971	8.596	112.562	185.565
5	Kutai Timur	9.062	32.157		5.369	90.660	137.248
6	Mahakam Ulu	11.835	19.730		30.338		61.903
7	Paser	35.113	1.912		1.862	14.383	53.271
8	Penajam Paser Utara					20.681	20.681
9	Samarinda		293				293
JUMLAH		**80.943**	**175.910**	**7.539**	**67.906**	**328.484**	**660.782**

Sumber : Target perhutanan sosial di Kalimantan Timur s.d 2019 seluas 660.782 Ha. Angka ini diperoleh dari Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS).

Realisasinya sampai saat ini masih kecil. Laporan perkembangan perhutanan sosial s/d Tahun 2018 sebesar 118.064,75 hektar (17,9% dari target), yang terdiri dari: Hutan Desa seluas 85.356 hektar, Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.990 hektar, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 9.940 hektar, dan Kemitraan seluas 4.949,52 hektar. Sedangkan realisasi Hutan Adat 48,85. Rincian per kabupaten dan per jenis skema perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Realisasi Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur

No	Kabupaten	Hutan Desa		HKm		HTR		20% Kemitraan		Hutan Adat		Total Luas (ha)
		Vol	Luas	Vol	Luas	Vol	Luas	Vol	Luas	Vol	Luas	
1	Balikpapan	-	-	1	1.400	-	-	-	-	-	-	
2	Berau	6	41.551	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kutai Timur	3	19.056	1	590	6	4.057,98	2	3.846	-	-	
4	Kutai Kartanegara	-	-	-	-	1	146	2	1.146,92	-	-	
5	Kutai Barat	3	8.405	-	-	1	48,85	-	-	1	48,85	
6	Mahakam Ulu	8	28.380	-	-	-	-	1	96	-	-	
7	Paser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	PPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	**20**	**105.637**	**2**	**1.990**	**8**	**9.940**	**3**	**5.088,92**	**1**	**48,85**	**118.064,75**

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, 2018

3. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan

Lahan kritis masih banyak ditemui di Provinsi ini. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini, diprediksi luas hutan kritis Kaltim seluas 12.731.562,37 hektar. Seluas 191.051,79 hektar dikelompokan sebagai kritis, dan seluas 129.911,88 hektar sangat kritis.

Tabel 3. Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan

Provinsi	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak kritis	Grand Total
Kaltim	7.071.383,48	191.051,79	3.616.252,12	129.911,88	1.722.963,10	12.731.562,37
Total						12.731.562,37

Sumber: SK MenLHK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Dengan kemampuan melakukan RHL per tahunnya berkisar antara 6.000 hektar – 10.000 hektar, kami berpandangan bahwa kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan masih menjadi kegiatan prioritas dimasa depan. Meskipun kami menyadari bahwa upaya penurunan lahan kritis sepenuhnya tidak dapat disandarkan hanya kepada program/kegiatan RHL. Namun perlu juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi tingginya tingkat konversi hutan dan lahan.

Tabel 4. Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2018

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Hutan	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
1.	KALTIM	BALIKPAPAN	45.406,08	-
2.		BONTANG	151.925,10	-
3.		SAMARINDA	60.483,31	-
4.		KUTAI BARAT	1.972.583,18	7.143,07
5.		KUTAI KARTANEGARA	2.598.953,86	14.359,26
6.		KUTAI TIMUR	2.836.646,28	9.265,33
7.		PASIR	1.083.884,15	-
8.		PENAJAM PASER UTARA	337.727,84	7.727,10
9.		BERAU	2.12.452,57	88,54
10.		MAHAKAM ULU	1.531.500,00	188,47
JUMLAH			12.731.562,37	38.771,77

Upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan melalui kegiatan RHL seringkali masih menemui beberapa kendala-kendala. Seperti saat ini, belum tersedianya dana pendamping dari APBD untuk mendukung kegiatan RHL yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) DR. Hal ini berpotensi menurunnya realisasi kegiatan RHL di Kaltim. Hal lainnya adalah terbatasnya kewenangan provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan RHL hanya di luar kawasan hutan dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Ini membuat ruang kami menjadi sangat terbatas, sementara kami memiliki sejumlah KPHP/KPHL yang wilayah kerjanya adalah kawasan hutan.

Hal lainnya adalah berkenaan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam program penurunan emisi gas rumah kaca. Memang jika merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananbahwa pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta penyusunan profil emisi GRK sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kehutanan. Kontribusinya sangat diharapkan dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi sektor berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan RHL bisa dikatakan sebagai kegiatan utama sektor berbasis lahan untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak saja berkontribusi dalam perbaikan kualitas tutupan lahan, namun juga membantu untuk mengurangi jumlah karbon yang lepas di atmosfir, dan menyimpannya di dalam vegetasi. Dikarenakan peran gandanya tersebut, maka untuk mendukung program penurunan emisi GRK tersebut kami perlu melakukan pengukuran, verifikasi dan pelaporan kegiatan RHL tersebut.

4. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya (KSDAE)

Kami berkeinginan untuk menurunkan intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan kami, seperti di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto dan juga di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan KPH.

a) Kebakaran Hutan

Titik panas (hotspot) selalu terdeteksi di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada Tabel 5. dibawah ini. Dimana Pada Tahun 2018 terdeteksi Pada Satelit NOAA yaitu 316 titik hotspot, dari data inilah yang dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan untuk melihat keadaan lapangan sebenarnya dan pengambilan langkah dan kebijakkan selanjutnya dengan melibatkan KPH setempat.

Tabel 5. Data Sebaran Hotspot Tahun 2016 – 2018

Tahun	BULAN													
	Januari	Feb	maret	april	Mei	Juni	Juli	Ags	sept	Okt	Nop	Des	Total	Satelit
2016	-	-	-	32	12	5	10	35	14	-	8	-	116	Terra / Aqua lapan
	86	90	46	18	4	3	8	26	14	19	13	2	329	NOAA
	-	-	-	18	9	1	7	17	22	7	1	1	83	NPP Lapan
Jumlah	86	90	46	68	25	9	25	78	50	26	22	3	528	
2017	-	-	-	2	1	2	3	20	42	34	1	-	105	Terra / Aqua lapan
	-	5	3	4	5	1	7	31	29	29	-	4	118	NOAA
	-	2	1	1	2	-	2	29	44	31	-	-	112	NPP Lapan
Jumlah	0	7	4	7	8	3	12	80	115	94	1	4	335	
2018				1	1	1	6	81	214	63	4	10	381	Terra / Aqua lapan
	1	5	3	11	12	12	9	38	182	38	3	2	316	NOAA
			6	1	2	2	5	56	148	91	5	6	322	NPP Lapan
Jumlah	1	5	9	13	15	15	20	175	544	192	12	18	1019	

Informasi berbasis deteksi dini (seperti informasi penyebaran hotspot harian) dan monitoring kebakaran hutan (hasil verifikasi hotspot, luasan kebakaran) harus selalu tersedia. Meskipun saat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak lagi dilakukan oleh UPTD PKHL, namun

sebaliknya dikoordinir oleh Bidang terkait di Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan KPH provinsi.

Kegiatan yang sifatnya pencegahan dan operasional pemadaman menjadi tanggung jawab KPH, namun untuk lokasi-lokasi di APL (luar kawasan hutan) membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait, seperti dengan pertanian, perkebunan, dan lainnya.

b) *Ilegal logging/perambahan*

Gambaran secara nasional, aktivitas illegal logging dan peredaran kayu illegal cenderung menurun secara signifikan Prestasi yang telah dicapai tersebut kemungkinan besar akan mampu dipertahankan di masa depan. Optimisme tersebut timbul karena didukung arahan pengelolaan kehutanan berbasiskan tapak. Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi.

Walaupun pada level tertentu, kami pun harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas kami untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut.

Hal lain yang juga penting adalah bagaimana kami mendorong SDM kami untuk lebih cerdas dan professional dalam menangani perkara-perkara illegal logging/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Tabel 6. Data Hasil Kegiatan Pengamanan Hutan Tahun 2018

NO	SURAT PERINTAH TUGAS		BARANG BUKTI TEMUAN	VOLUME			LOKASI TEMUAN/TITIK TEMUAN	POSISI BB	KETERANGAN	KONVERSI LUASAN (Ha)
	Nomor	Tanggal		Ukuran	Potong	Kubikasi M^3				
1	090/23/KPHP/BB.III/2018	26 Februari 2018	Kayu Olahan							
			Kelompok Jenis Meranti	2 x 19 x 4 M	50	0,76	Kawasan Hutan Wilayah Segah	KANTOR UPTD		0,7600
							50N 0518136	KPHP BERAU BARAT		
							228365			
2	090/23/KPHP/BB.III/2018	26 Februari 2018	Mesin Pengolahan Kayu				Kawasan Hutan Konsesi	KANTOR UPTD	1 (Satu) Unit Chain Saw	
			(Chain Saw)				PT. Inhutani I Unit Labanan II	KPHP BERAU BARAT	Merk STHIL	
							50N 0511444			
							223578			
3	090/23/KPHP/BB.III/2018	26 Februari 2018	Alat Berat				Kawasan Hutan Konsesi	KANTOR UPTD	Proses Penyidikan	
			Mini Excavator				PT. Inhutani I Unit Labanan II	KPHP BERAU BARAT	Tim Balai Pengamanan	
			Type ZX 480-5A/HCMAE				50N 0506408		dan Penegakan hukum	
			90J00034994				228711		Lingkungan Hidup	
			Warna Orange						dan Kehutanan	
									Wilayah Kalimantan	
4	090/822/DK-I/SPT/2018	14-Sep-18	Kayu Olahan			61,2124 M^3	Kutai Barat	KANTOR KPHP	Rencana Proses	61,2124
								BATU AYAU	Pelelangan	
5	090/1393/DK-I/SPT/2018	22 Oktober 2018	Dump Truk warna kuning		252	7,173 M^3	Tenggarong-Kota Bangun	KANTOR GAKKUM	DIPROSES BALAI	7,1730
			Merk Mitsubishi				desa Jonggon Kec. Loa Kulu		PENGAMANAN DAN	
			Canter 125 HD				S.00° 26' 53,97" E 116° 52' 24,78"		GAKKUM	
			No.Pol. AG 8433 DB							
			Dump Truk No. Pol 8587 QP		353	9, 283 M^3				9,2830
6		27 Nopember 2018	Kayu Olahan			13 M^3				13,0000
	TOTAL									91,4284

Kami juga perlu untuk mendorong tersedianya pendanaan untuk penanganan pelanggaran administratif terutama dari APBN. Karena hasil dari denda pelanggaran administratif sepenuhnya disetorkan kepada negara, dan tidak menjadi bagian dari dana perimbangan.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai data asset tetap pada tahun 2018 dengan garis besar rincian :

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	*2*	*3*	*4*
1	Tanah	9.000	M^2
2	Gedung	4/5.580,25	Unit/M^2
3	Listrik	2/20	Induk/jaringan
4	Air	2	Jaringan

5	Ruang Rapat	2	Ruang
6	Koperasi	1	Buah
7	Alat alat Besar	2	Set
8	Alat – alat Angkutan	96	Unit
9	Alat Bengkel dan Alat Ukur	86	Unit
10	Alat Pertanian	2	Buah
11	Alat kantor dan Rumah tangga	2.210	Unit
12	Alat Studio dan Alat komunikasi	99	Unit
13	Alat – Alat kedokteran	20	Unit
14	Alat Laboratorium	206	Unit

Sumber: Data SIMDA BMD 2018

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan[1]. Tujuan disampaikan untuk jangka waktu tertentu agar pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada. Tujuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan berkelanjutan
- Menurunkan luas deforestasi dan degradasi hutan.
- Terwujudnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Meningkatnya peran masyarakat di dalam dan atau disekitar hutan.

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah[2]. Sasaran yang akan dicapai yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- Peningkatan produktivitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor Kehutanan.
- Menurunnya luas kerusakan hutan.

---

[1] *Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 49.*
[2] *Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 50.*

- Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan.

3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam Sasaran strategik adalah:

- Jumlah DBH PNPB sektor Kehutanan
- Prosentase Luas Kerusakan Hutan
- Luas Lahan Kritis dan Lahan Terbuka yang di tanami
- Jumlah Jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau sekitar kawasan hutan

4. Target Tahunan

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2018, OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 192.867.555.600,- menjadi sebesar Rp. 264.050.837.350,- terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 71.183.281.750,- atau terdapat kenaikan sebesar 36,91 % di tahun 2018 untuk Belanja Langsung (BL), sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) juga mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 301.976.183.600,- menjadi sebesar Rp. 378.779.640.350,- terdapat kenaikan anggaran sebesar 76.803.456.750 atau sebesar 25,43%.

5. Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi[3].

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta program Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program-program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2013 - 2018 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah meliputi program-program sebagai berikut :

a. Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
c. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
d. Program Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan social.

[3] *Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 54.*

Tabel. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program / kegiatan serta penyajian IKU.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s/d Th 2013	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan berkelanjutan	Jumlah DBH PNBP sektor Kehutanan	Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor Kehutanan	Jumlah DBH PNBP sektor Kehutanan	Rupiah	27.110 633.613	54.704. 519.213	32.910. 270.000	26.740. 105.000	13.000. 000.000	13.000. 000.000
Menurunkan luas deforestasi dan degradasi hutan	Prosentase luas kerusakan hutan	Menurunnya luas kerusakan hutan	Prosentase luas kerusakan hutan	% (persen)	9,18	0,37	1,76	1,3	1	1
Terwujudnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Hektar	46.580,81	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750
Meningkatnya peran masyarakat didalam dan atau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan	Jumlah jenis usaha perhutanan sosial	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan	Jumlah jenis usaha perhutanan sosial	Jumlah jenis usaha	-	-	-	4	4	4

Tabel. Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan berkelanjutan	Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor Kehutanan	Jumlah DBH PNBP sektor Kehutanan	Rupiah	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan	1. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan 2. Review RKTP 3. Identifikasi Prubahan status dan fungsi kawasan hutan 4. Pendampingan Tata Hutan wilayah KPH dan Tahura 5. Inventarisasi Potensi Kawasan Hutan yang tidak di bebani Perijinan 6. Penyusunan Database Kehutanan Berbasis SIG 7. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan pemenfaatan Hasil Hutan 8. Rekonsiliasi Realisasi Produksi Hasil Hutan 9. Sosialisasi peraturan Perundangan Bidang Pemanfaatan Hutan 10. Pendidikan dan atau pelatihan sector kehutanan 11. Promosi HHBK dan jasa lingkungan 12. Identifikasi potensi pengembangan jasa lingkungan 13. Identifikasi potensi pengembangan HHBK 14. Penertiban peredaran hasil hutan dan peningkatan penerimaan iuaran hasil hutan 15. Pengawasan dan peningkatan penerimaan iuaran hasil hutan pada unit manajemen 16. Pembinaan industri hasil hutan pemegang IPHH 17. Penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan 18. Kordinasi/sinatergis antar KPH Se Kalimantan timur

						revegetasi lahan pasca tambang 7. Rehabilitasi mangrove dan pesisir 8. Identifikasi dan inventarisasi sumber daya genetic / tanaman hutan 9. Monitoring dan evaluasi peredaran benih tanaman hutan 10. Monitoring dan evaluasi deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka mitigasi perubahan iklim 11. Rekonsiliasi realisasi keberhasilan penanaman di dalam dan luar kawasan hutan
4	Meningkatnya peran masyarakat didalam dan atau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan	Jumlah jenis usaha perhutanan sosial	Jumlah jenis usaha	Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan, dan perhutanan sosial	1. Pendampingan, pembentukan dan kelembagaan kelompok tani hutan 2. Pendampingan peningkatan usaha perhutanan social dan kemitraan 3. Pendampingan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan 4. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan 5. Peningkatan kapasitas PKSM dan Pencinta Alam 6. Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh 7. Koordinasi proses pengembangan usaha perhutanan social dan kemitraan 8. Pembinaan pengelolaan unit usaha program perhutanan social dan kemitraan bidang kehutanan 9. Koordinasi pemanfaatan sumber dana dari PMDH/Kelola social/comdev/CSR 10. Monitoring dan evaluasi perhutanan social dan kemitraan 11. Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan resolusi konflik. 12. Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan hutan untuk religi, budaya

2	Menurunkan luas deforestasi dan degradasi hutan	Menurunnya luas kerusakan hutan	Prosentase luas kerusakan hutan	% (persen)	Perlindungan dan KSDAE	1. Identifikasi dan iventarisasi daerah kerawanan kerusakan kawasan hutan 2. Pengamanan kawasan hutan 3. Penyidikan, penegakan hokum, advokasi dan konsultasi bantuan hukum. 4. Peningkatan SDM pelaksana perlindungan dan pengamanan hutan KPH 5. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan 6. Pengembangan SDM Pengendalian kebakaran hutan dan lahan 7. Pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan 8. Penanganan pasca kebakaran 9. Pembangunan system informasi kebakaran hutan dan lahan 10. Monitoring dan evaluasi kebakaran hutan dan lahan 11. Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan 12. Bimbingan teknis konservasi KSDAE 13. Pembinaan dan pengelolaan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi
3	Terwujudnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Hektar	Pengelolaan DAS dan RHL	1. Penyusunan rencana pengelolaan DAS 2. Pembangunan system informasi pengelolaan DAS 3. Peningkatan kelembagaan pengelolaan DAS 4. Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi lahan (RPRL) dan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL) 5. Rehabilitasi hutan dan lahan 6. Bimbingan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi /

						13. Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat 14. Fasilitas permohonan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat 15. Pembinaan dan pendampingan peningkatan kelembagaan pengelolaan hutan adat 16. Monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan adat 17. Rapat kerja Pokja percepatan pembentukan perhutanan social Tingkat Provinsi

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan produktivitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Jumlah DBH PNBP sector kehutanan	Menghitung jumlah pendapatan dana bagi hasil (DBH) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sector kehutanan	'(Realisasi PNBP PSDH & IIUPH x 16 %) + (Realisasi PNBP DR x 40 %	Dokumen rekonsiliasi per triwulan dengan wajib bayar dan kementerian LHK	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan)
2	Menurunnya luas kerusakan hutan	Prosentase luas kerusakan hutan	Mengukur luas kerusakan lahan yang terjadi di dalam kawasan hutan	Jumlah luas kerusakan hutan ———————— X 100 % Jumlah luas kawasan hutan	1. Data luas kebakaran hutan 2. Data illegal logging 3. Data luas kawasan hutan	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Perlindungan dan KSDAE)
3	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Mengukur tutupan lahan pada lahan kritis dan terbuka yang ditanami	Menghitung luasan rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai oleh pemerintah (APBN dan APBD) ditambah luas penanaman yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya	1. Menghitung lahan kritis provinsi Kaltim 2. Laporan penanaman oleh para pihak 3. Laporan permohonan bantuan bibit penghijauan	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Pengelolaan DAS dan RHL)

4	Meningkatnya peran serta masyarakat di dalam dana tau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan	Jumlah jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dana tau disekitar kawasan hutan	Mengukur jumlah jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dana tau disekitar kawasan hutan	Menghitung jumlah jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dana tau disekitar kawasan hutan yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN dan APBD) serta yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya	1. Data Kelompok Masyarakat yang menjalankan Perhutanan Sosial dan Kemitraan 2. Laporan perusahaan yang menjalin kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Perjanjian Kineja Tahun 2018

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Peningkatan produktivitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor Kehutanan	Jumlah DBH PNBP sektor Kehutanan	Rupiah	87.034.483.250
2	Menurunnya luas kerusakan hutan	Prosentase luas kerusakan hutan	%	≤ 1,5
3	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Hektar	38,750
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan	Jumlah jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dana tau disekitar kawasan hutan	Jenis Usaha	4

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017
1	Perencanaan Kinerja	30 %	22,29	23,85
2	Pengukuran Kinerja	25 %	19,69	19,06
3	Pelaporan Kinerja	15 %	11,59	10,15
4	Evaluasi Kinerja	10 %	6,17	6,04
5	Capaian Kinerja	20 %	9,81	11,63
	Nilai Hasil Evaluasi	**100 %**	**69,54**	**70,73**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**BB**

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP.

Rekomendasi		Tindak Lanjut
a.	**Perencanaan Kinerja**	
	1. Target jangka menengah dalam renstra supaya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	Untuk memonitor pencapaian target jangka menengah renstra maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renstra pertahun denbgan cara melaksanakan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan setiap Triwulan dan telah dilaporkan ke Bappeda Prov. Kaltim (surat dan hasil Evaluasi Terlampir)
	2. Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran agar didukung dengan anggaran yang memadai	Pada tahun 2018 Dinas Kehutanan hanya mendapat anggaran APBD Murni sebesar Rp. 852.720.000,- dari usulan yang ada pada

		Dokumen Renstra sebesar Rp, 14.602.720.000,- hal ini dikarenakan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami penurunan dimana anggaran hamper sebagian sebesar untuk memenuhi standar minimal kegiatan kesektariatan Kantor DInas dan 9 (Sembilan) UPTD dengan karyawan ± 749 orang
	3. Dokumen PK supaya menetapkan hal -hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).	Pembuatan Prjanjian Kinerja Dinas Kehutanan mengalami permasalahan dimana Hampir semua Program dan Kegiatan Teknis baik yang Dinas maupun di UPTD tidak tersedia anggaran untuk menunjang Program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga Perjanjian Kinerja yang di buat
	4. Rencana aksi atas kinerja supaya dimonitor pencapaiannya secara berkala.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi secara berkala dan dipergunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dimana Dinas Kehutanan telah : 1. Menyampaikan Surat No. 935/1140/DK-I/2018 tanggal 3 April 2018 Kepada Pejabat Kepala Bidang dan UPTD perihal Laporan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 per triwulan untuk Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 April 2018, untuk Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli 2018, Untuk Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 Oktober 2018 dan untuk Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 04 Januari 2019 **(Surat Terlampir).**
	5. Rencana aksi agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.	Dinas Kehuatan telah memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dengan melaksanakan kegiatan
b.	**Pengukuran Kinerja**	
	1. Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas supaya dimanfaatkan sebagai	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Memanfaatkan hasil informasi yang digunakan untuk penilaian kinerja sebagai dasar pemberian reward kepada Pejabat yang

	dasar pemberian reward dan punisgment.	berhasil mencapai target pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah dibuat. **(Piagam Penghargaan atas Capaian Perjanjian Kinerja dan Foto penyerahan Piagam terlampir**
	2. Pengukuran kinerja atas rencana aksi agar digunakan untuk pengendalian kinerja secara berkala .	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja Secara berkala setiap Triwulan I,II,III dan IV pada system E-Sakip berdasarkan laporan Capaian Kinerja dari pejabat Esselon III dan IV
c	**Pelaporan Kinerja**	
	1. Laporan kinerja supaya menyajikan pertandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan menyajikan analisi edisiensi pengunaan sumberdaya	Dinas Kehutanan telah menyajikan perbanduingan Data Kinerja antara Tahun berjalan dengan tahun sebelumnya di dalam Laporan LAKIP dan akan menyajikan analisis pengunaan sumberdaya
	2. Informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat diandalkan.	Di dalam Laporan Kinerja Dinas Kehutanan meminta Kepada Bidang dan UPTD agar dilengkapi dengan bukti yang dapat diandalkan (Laporan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan)
	3. Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanan dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	Berdasarkan hasil pemantauan rencana aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan digunakan untuk perbaikan kinerja setiap periode. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan revisi target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kepada Seketaris Daerah Cq. Biro Organisasi sesuai surat kami No. 935/2317/DK-I/2018, 12 September 2018 **(surat terlampir)**
	4. Informasi yang disajikan supaya digunakan untuk peingkatan kinerja dan penilaian kinerja.	Berdasarkan hasil pelaporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah mengintruksikan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar digunakan untuk peingkatan kinerja dan penilaian kinerja
d	**Evaluasi Internal**	
	1. Hasil evaluasi agar dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/terkait	Berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi Dinas kehutanan telah menyampaikan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV Lingkup Dinas dan UPTD untuk disegera

		ditindaklanjuti
	2. Pemantauan rencana aksi agar dapat memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.	Berdasarkan hasil pemantauan rencana aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan digunakan untuk perbaikan kinerja setiap periode. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan revisi target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kepada Seketaris Daerah Cq. Biro Organisasi sesuai surat kami No. 935/2317/DK-I/2018, 12 September 2018 **(surat terlampir)**
	3. Hasil evaluasi rencana aksi agar memberikan perbaikan setiap priode.	Berdasarkan hasil pemantauan rencana aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan digunakan untuk perbaikan kinerja setiap periode. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan revisi target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kepada Seketaris Daerah Cq. Biro Organisasi sesuai surat kami No. 935/2317/DK-I/2018, 12 September 2018 **(surat terlampir)**
	4. Hasil evaluasi rencana aksi agar ditidak lanjuti dalam bentuk langka-langka nyata.	Berdasarkan Hasil evaluasi rencana aksi agar ditidak lanjuti dalam bentuk langka-langka nyata dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah mengintruksikan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar supaya membuat langkah langkah nyata untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
	Pencapaian Kinerja	
	1. Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.	Dalam pencapaian kinerja akan terus dilakukan perbaikan kinerja sehingga Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar terus meningkatkan capaian kinerja
	2. Informasi mengenai kinerja agar dapat diandalkan	Informasi pencapaian kinerja akan terus dilakukan perbaikan sehingga Informasi mengenai kinerja lebih dapat diandalkan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaiakan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar setiap informasi kinerja dilampiri dengan bukti

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan	Rp.	87.034.483.250	Triwulan I	13.055.172.487,5	33.699.953.539,8	258,13
					Triwulan II	13.055.172.487,5	18.777.635.682,6	143,83
					Triwulan III	13.055.172.487,5	116.176.708.122.42	889.89
					Triwulan IV	47.868.965.787,5	586.444.188,16	967,91
2	Menurunnya Luas Kerusakan hutan	Prosentase Luas Kerusakan Hutan	%	≤ 1,5	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	1,49	1,49	100
3	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas Lahan Kritis dan Lahan terbuka yang ditanami	Ha	38.750	Triwulan I	8.441	13.136,77	155,63
					Triwulan II	363	33,9	9.33
					Triwulan III	14.973	134	0.89
					Triwulan IV	14.973	25.501	170,31
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan	Jumlah Jenis Usaha Perhutanan Sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	Jenis Usaha	4	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	4	4	100

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1. Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	INDIKATORKINERJA	TAHUN 2018			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan	Rp	87.034.483.250	212.755.562.213,35	244,45

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	% peningkatan /Penurunan Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=6/5*100 %
1.	Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan kehutanan	Rp	23.625.013.874	176.586.444.188,16	212.755.562.213,35	120,48

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1.	Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan kehutanan	Rp	13.000.000.000	212.755.562.213,35	1.637

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran 1. Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan dengan indikator Jumlah DBH

PNBP Sektor Kehutanan pada tahun 2017 sebesar Rp. 176.586.444.188,16 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 212.755.562.213,35 dengan capaian kinerja Naik. Pencapaian Kinerja pada tahun 2018 dapat dirincikan seperti tabel dibawah ini :

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi Pungutan Iuran (Rp)	Perhitungan DBH Provinsi Kaltim	
			%	Rp.
1	PSDH	28.111.094.046,08	16	4.497.775.047,37
2	DR	183.312.268.967,27	40	152.354.895.516,80
3	IIUPH	1.332.199.200,00	16	213.151.872,00
JUMLAH		**212.755.652.213,35**		**157.065.822.436,17**

telah melebihi target Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar Rp. 125.721.078.963,35. walaupun tidak mendapat anggaran pada APBD TA. 2018 Pencapaian target tersebut dapat direalisasi oleh Bidang Perencanaan dan Pemanfaatakan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatakan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan pada tahun 2018 disebabkan karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

   Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis1 yaitu Peningkatan

produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan dengan indikator Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan adalah Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dengan 12 Kegiatan seperti tabel di bahwa ini :

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018
Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan	**Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan**	**13.000.000.000 (Rp)**	**212.755.652.213,35 (Rp)**
Penyusunan neraca sumber daya hutan	Dokumen NSDH	1	1
Review RKTP	Dokumen RKTP	1	1
Penyusunan Database Kehutanan Berbasis SIG	Dokumen Database Kehutanan	1	1
Koordinasi/Sinergitas antar KPH se Kalimantan	Jumlah Koordinasi Sine	11	11
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan	Jumlah unit usaha yang dilakukan Pengawasan dan pengendalian	5	5
Rekonsiliasi realisasi produksi hasil hutan	Jumlah Rekonsiliasi	2	2
Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Produksi dan Kegiatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Jumlah Unit IPPKH yang dilakukanPengawasan dan Pengendalian	6	6
Pembinaan dan Pengendalian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)	Jumlah Unit Pemegang Ijin IPK yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	5	5
Penertiban Peredaran Hasil Hutan dan Peningkatan Penerimaan Iuran Hasil Hutan	Jumlah Penertiban Peredaran dan Pembayaran PNBP	5	5
Pengawan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penerimaan Iuran Hasil Hutan pada Unit Manajemen	Jumlah unit manajemen	100	152
Pembinaan Industri Hasil Hutan pada Pemegang IPHH	Jumlah IHH yang di bina	10	16

Penilaian dan Evaluasi perizinan Industri Primer Hasil Hutan	Jumlah IPHH yang di Nilai dan di Evaluasi	10	17

Dimana Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada tahun 2018 tidak mendapat anggaran kegiatan dari APBD TA. 2018 hal tersebut dikarenakan anggaran APBD Murni Dinas Kehutanan tidak dapat membiaya semua kegiatan teknis pada Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan tersebut.

Keberhasilan pencapaian target tersebut di atas karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kemetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan pada Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan dan 9 UPTD Lingkup Dinas Kehutanan yaitu ; UPTD KPHP Kendilo yang berkedudukan di Tanah Grogot, UPTD KPHP Meratus yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP Bongan yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP DAS Belayan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Santan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Bengalon yang berkedudukan di Sangata, UPTD KPHP Berau Barat yang berkedudukan di Tanjung Redeb dan UPTD Tahura Bukit Soeharto yang berkedudukan di Samarinda.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100 %. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara

output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN FISIK	% PENYERAPAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan	Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan	244,45	Tidak tersedia anggaran	244,45

Sasaran 2. Menurunnya Luas Kerusakan hutan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran Prosentase Luas Kerusakan hutan di dapat dari Total Luas Kebakaran Hutan ditambah Luas Pembukaan Lahan IPPKH serta ditambah kegiatan Illegal Logging di bagi luas Kawasan Hutan (SK Menhut No. 718 Tahun 2014) di kali 100 % Yaitu:

No.	Luas Kebakaran Hutan (Ha)	Luas Pembukaan Lahan IPPKH (Ha)	Illegal logging (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	% Luas Kerusakan Hutan (Ha)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (2+3+4/5*100%)*
1.	7.310	116.894,28	91,43	8.333.294,83	**1,49**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim

Dari Tabel diatas sehingga di dapatkan Hasil Prosentase Luas Kerusakan Hutan sebesar 1,49 bila di bandingkan dengan target Kinerja tahun 2018 maka di dapatkan capaian sebesar 100 % seperti Tabel di bawah ini.

NO	INDIKATORKINERJA	TAHUN 2018			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Prosentase luas kerusakan hutan	%	≤ 1,5	1,49	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	% peningkatan/Penurunan Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(6-5)/5*100 %
1.	Prosentase luas kerusakan hutan	%	1,28	1,01	1,49	146.06

Bila di bandingkan dengan tahun sebelumnya memang terjadi peningkatan prosentase luas kerusakan hutan hal ini di kareanakan luas pembukaan lahan Ijin Pinjam Pakai Kawasan yang dikeluarkan oleh kementrian terkait.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Prosentase luas kerusakan	%	≤1,5	1,49	100

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran 2. Menurunnya luas Kerusakan Hutan dengan indikator Prosentase luas kerusakan hutan pada tahun 2018 sebesar 1.49 % dengan capaian kinerja sesuai Target Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan dimana Prosentase luas kerusakan hutan pada tahun 2018 sebesar ≤ 1,5 %. walaupun tidak mendapat anggaran pada APBD TA. 2017 Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam merelialisasikan target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Keberhasilan Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam mencapai target Prosentase luas kerusakan hutan pada tahun 2018 sebesar 1.49 %. disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu Menurunnya luas Kerusakan Hutan dengan indikator Prosentase luas kerusakan hutan adalah Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekositem dengan 17 Kegiatan seperti tabel di bawah ini :

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018
Program perlindungan dan KSDAE	**Jumlah penanganan perlindungan hutan dan KSDAE**	**5**	**5**
Identifikasi dan inventarisasi daerah Kerawanan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Peta Kerawanan Kerusakan Hutan	2	2
Pengamanan Kawasan Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan di KPH (P/L dan Tahura)	5	10
Peningkatan SDM pelaksana Perlindungan dan Pengamanan Hutan di KPH	Jumlah personil pengamanan hutan	45	150
Penyidikkan, penegakkan hokum, advokasi dan konsultasi bantuan hukum	Jumlah Penanganan Kasus Tripihut	1	1
Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan	7	20
Sosialisasi/Kampanye Pencegahan KHL	Jumlah Sosialisasi	4	4
Pantroli Pencegahan KHL	Jumlah Patroli	4	8
Pelatihan/Pembekalan/Inhousetranning/ Penyegaran/Bimtek Pengendalian KHL	'Jumlah Bimtek	2	2
Rekomendasi pelaksanaan Rehabilitasi areal Bekas Terbakar	Jumlah Lokasi	1	0
Penaksiran Luas Kebakaran dan investigasi sebab-sebab kebakaran	Jumlah Lokasi	1	1
Pemadaman KHL	Jumlah Konsultasi	2	2
Penetapan Posko Pengendalian KHL	Jumlah Lokasi	3	3
Bimbingan Teknis Konservasi SDA dan Ekositem	Jumlah Lokasi	5	5
Pembinaan dan Pengelolaan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Jumlah Unit	2	2

Dimana Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekositem pada tahun 2018 tidak mendapat anggaran kegiatan dari APBD TA. 2018 hal tersebut dikarenakan anggaran APBD Murni Dinas Kehutanan tidak dapat membiaya semua kegiatan teknis pada Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan tersebut.

Keberhasilan pencapaian target tersebut di atas karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan dan 9 UPTD Lingkup Dinas Kehutanan yaitu ; UPTD KPHP Kendilo yang berkedudukan di Tanah Grogot, UPTD KPHP Meratus yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP Bongan yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP DAS Belayan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Santan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Bengalon yang berkedudukan di Sangata, UPTD KPHP Berau Barat yang berkedudukan di Tanjung Redeb dan UPTD Tahura Bukit Soeharto yang berkedudukan di Samarinda.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100 %. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN FISIK	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Menurunnya luas kerusakan hutan	Prosentase luas kerusakan hutan	100	0	100

Sasaran 3. Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	INDIKATORKINERJA	TAHUN 2018			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Ha	38.750	38.771,77	100, 06

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	% peningkatan /Penurunan Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(6-5)/5*100 %
1.	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Ha	55.430,92	40.901,85	38.771,77	0,001

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami Kehutanan	%	38.750	38.771,77	100.06

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja sasaran 3. Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka dengan indikator Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami seluas 41.401,85 Ha pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 seluas 38.771,77 Ha dengan capaian kinerja turun. Walaupun turun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 tetapi telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2018 seluas 38.750 Ha.

Untuk tahun 2018 sendiri Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan berupa kegiatan penanaman dengan luas 38.771,77 Ha yang dlaksanakan pada 6 Kabupaten Kelompok DAS di 6 Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Hutan	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
1.	KALTIM	BALIKPAPAN	45.406,08	-
2.		BONTANG	151.925,10	-
3.		SAMARINDA	60.483,31	-
4.		KUTAI BARAT	1.972.583,18	7.143,07
5.		KUTAI KARTANEGARA	2.598.953,86	14.359,26
6.		KUTAI TIMUR	2.836.646,28	9.265,33

7.		PASIR	1.083.884,15	-
8.		PENAJAM PASER UTARA	337.727,84	7.727,10
9.		BERAU	2.12.452,57	88,54
10.		MAHAKAM ULU	1.531.500,00	188,47
JUMLAH			12.731.562,37	38.771,77

Pencapaian target tersebut dapat direalisasi oleh Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami seluas pada tahun 2018 seluas 38.771,77 Ha disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta Mitra Dinas Kehutanan BPDAS-HL Mahakam Berau, para pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan Pengolaan DAS dan RHL.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018
Program Pengelolaan DAS dan RHL	**Jumlah DAS prioritas yang dikelola secara terpadu**	**11**	**11**
Penyusunan rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPHL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL)()	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan Tingkat provinsi	1	0
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas penanaman dan Pemeliharaan	8.750	0
Bimbingan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi/revegetasi lahan	Jumlah Bimbingan dan evaluasi	10	6

pasca tambang			
Rehabilitasi Mangrove Pesisir	Luas Rehabilitasi Mangrove Pesisir	725	0
Monitoring dan Evaluasi deforestasi dan degradasi Hutan dalam Rangka mitigasi perubahan iklim	Jumlah Monev	4	0
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS	1	0
Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga Forum DAS di Kab/Kota	5	0
Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan DAS wilayah Provinsi	Jumlah Sistem Informasi DAS berbasis IT	1	0
Rekonsiliasi realisasi keberhasilan penanaman di dalam dan luar kawasan hutan	Jumlah Rekonsiliasi	4	0
Penyediaan Benih	Tersedianya Sertifikasi Benih	4	4
Pengedaran Benih dan Bibit	Terbitnya SK Pengada dan Pengedar benih/bibit	1	1
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit	Terselenggaranya bimbingan dan pengawasan	17	17

Program Pengelolaan DAS dan RHL pada tahun 2018 mendapat anggaran kegiatan dari APBD 2018 sebesar 167.125.702.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dengan kegitan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir yang bersumber dari Dana DBH SDA DR yang Dokumen Pelaksanaan anggaran Satua Kerja perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2018 telah d syahkan pada tanggal 29 Desember 2017 tetapi dengan adanya perubahan RKA DBH SDA DR yang didasarkan pada:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07 tanggal 29 Desember 2017 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumner Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) yang menjelaskan mengenai: Program/kegiatan yang diperbolehkan semakin luas (tidak terbatas hanya untuk reboisasi dan rehabilitasi

lahan/RHL, Serta minimal 50 % alokasi penganggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bagi daerah potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan.

b. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.112/MENLHK/PPI.4/3/2018 tanggal 5 Maret 2019 tentang Daerah Potensi Tinggi Karhutla dalam rangka penggunaan DBH SDA DR Tahun 2018

c. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan APBD Mendahului Perubahan APBD TA. 2018 Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 27 Agustus 2018

Sehingga effektif waktu Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DBH SDA DR baru dapat dilaksanakan pada bulan September Tahun 2018.

Keberhasilan Program Pengelolaan DAS dan RHL dalam menunjang Sasaran Strategis 3 yaitu Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka dengan indikator indikator Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami seluas 38.771,77 pada tahun 2018. Pencapaian target tersebut di atas karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

Program Pengelolaan DAS dan RHL dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan dan 9 UPTD Lingkup Dinas Kehutanan yaitu; UPTD KPHP Kendilo yang berkedudukan di Tanah Grogot, UPTD KPHP Meratus yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP Bongan yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP DAS Belayan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Santan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Bengalon yang berkedudukan di Sangata, UPTD KPHP Berau Barat

yang berkedudukan di Tanjung Redeb dan UPTD Tahura Bukit Soeharto yang berkedudukan di Samarinda

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100 %. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN FISIK	% PENYERAPAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
3.	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	100,06	0	100,06

Sasaran 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	INDIKATORKINERJA	TAHUN 2018			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	Jenis Usaha	4	4	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	% peningkatan/ Penurunan Tahun 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	6=(5-4)/4*100 %
1.	Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	Jenis Usaha	0	4	4	0

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	Jenis Usaha	4	4	100

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dengan indikator Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam

dan atau disekitar kawasan hutan pada tahun 2018 sebanyak 4 Jenis Usaha dan pada tahun 2018 sebanyak 4 Jenis Usaha yang terdiri dari :

a. Hutan Desa

Dimana masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan mendapat akses legal untuk mengelola hutan negara dimana mereka hidup dan bersosialisasi.

Di Kabupaten Kutai Timur Pada Tahun 2018 terdapat 2 (dua) lokasi yang telah berizin dan 3 (Tiga) lokasi yang telah dilakukan verifikasi teknis yaitu:

1) Pengelola LPHD Pulung Urip yang terletak di Desa Miau Baru Kec. Kongbeng dengan luas 1.983 hektar, berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat Di Konversi (HPK), dan sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *(Nomor SK. 6995/Menlhk-PSKL/PSL.0/12/2017, tanggal 29 Desember 2017).*
2) Pengelola LPHD Karangan hilir yang terletak di Desa Karangan Hilir, Kec. Karangan dengan luas 7.597 hektar, berada pada Hutan Lindung (HPT) dan sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *(Nomor SK. 7034/Menlhk-PSKL/PKPS/12/2017, tanggal 29 Desember 2017).*
3) Desa Baay, Kecamatan Karangan dengan luas 1.966,63 Hektar.
4) Desa Biatan Ulu, Kecamatan Biatan dengan Luas 10.115 Hektar
5) Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karangan dengan Luas 2.198 Hektar

Di Kabupaten Berau terdapat 1 (satu) lokasi hutan desa yang telah berijin dan 2 (Tiga) lokasi hutan desa yang sudah diverifikasi Teknis Yaitu:

1) LPHD Pagat Batumpuk yang terletak di DesaPagat Batumpuk , Kec. Pulau Derawan dengan luas 11.180 hektar, berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT), sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nomor SK.

7992/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018, tanggal 14 Nopember 2018).

2) Desa Long Lanuk, Kec. Sambaliung dengan luas 8.293 hektar.
3) Desa Long Laay Kec. Segah dengan luas 1.000 Hektar.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 6 (Enam) lokasi hutan desa yang sudah diverifikasi Teknis Yaitu:

1) Desa Tuana Tuha, Kec. Kenohan dengan luas 5.469 hektar.
2) Desa Sebelimbingan Kec. Kota Bangun dengan Luas 2,104 hektar
3) Desa Genting Tanah Kec. Kembang Janggut dengan Luas 4.837,27 Hektar
4) Desa Muhuran Kec. Kota Bangun dengan luas 1.567,67 Hektar
5) Desa Teluk Muda Kec. Kenohan dengan Luas 2.284 Hektar
6) Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman dengan Luas 9.250,03

b. Hutan Tanaman Rakyat

Hutan Tanaman Rakyat atau HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Pembentukan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) padatahun 2018 di Provinsi Kalimantan Timur Terdapat di Kabupaten Kutai Barat tetapi proses perijinannya baru pada tahap verifikasi Lahan yaitu:

1) Kelompok Tani Jengan Simpang Tuha Desa Penarung, Kec. Bentian Besar dengan luas 285 hektar.
2) Kelompok Tani Putra Lawa Desa Penarung, Kec. Bentian Besar dengan luas 323 hektar.
3) Kelompok Tani Saman Takaq Desa Penarung Kec. Bentian dengan Luas 381 Hektar

c. Kemitraan Kehutanan

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemi, traan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Masyarakat setempat yang dimaksud adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dana tau disekitar hutan, yang bermukim di dalam dan disekitar kawasan hutan yang memiliki komonitas social dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan kativitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Di Kabupaten Kutai Timur Pembentukan Usaha dengan pola Kemitraan Kehutanan Terdapat 1 (Satu) desa yang telah mendapatkan ijin dan 1(satu) desa yang masih pada tahap verifikasi lahan Yaitu:

1) Pemegang IUPHHK-HA PT. Ratah Timber, lokasinya terletak di Desa Mamahaq Teboq, Kecamatan Karangan dengan luas areal 96 hektar yang merupakan mitra Kelompok Tani Hunge Palau, jenis kerjasamanya bagi hasil serta produk kemitraannya adalah Hutan Sengon, Karet, Durian dan Petai (*NKK No. 617/RTC.C/C.2.E/XI/2017, Nomor SK. 01/KTH-HP/MT-LH/XI/2017, tanggal 11 Nopember 2017).*
2) Pemegang Ijin IUPHHK-HT Santan Borneo Abadi di Desa Pengadan Kec. Karangan

Di Kabupaten Kutai Kartanegara Pembentukan Usaha dengan pola Kemitraan Kehutanan Terdapat 1 (Satu) desa yang masih pada tahap verifikasi lahan yaitu Kelompok Tani Maju Bersama Desa Bakungan Kec. Loa Janan.

d. Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pembentukan Hutan Adat pada **Tahun 2018** di Provinsi Kalimantan Timur seluas 48,85 hektar yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat. Nama Hutan adat adalah Hemaq Beniung yang terletak di Desa Kampung Juaq, Kec. Barong Tongkok, yang sduah mendapatkan legalitas Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. IUPHHK HTR Nomor SK. 4618/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/2017, tanggal 5 September 2017.

dengan capaian kinerja sebanyak 4 jenis usaha tersebut diatas maka capaian kinerja pada tahun 2018 adalah Tercapai. Pencapaian target tersebut direalisasikan oleh Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.

Keberhasilan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mencapai target Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan sebanyak 4 Jenis Usaha disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta Mitra Dinas Kehutanan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis4 yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dengan indikator Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutanadalah Program

Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial dengan 15 Kegiatan seperti tabel di bawah ini :

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018
Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	**Jumlah Kelompok Tani Hutan Yang Melaksanakan Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan**	**5**	**5**
Koordinasi proses pengembangan usaha perhutanan social dan kemitraan	jumlah koordinasi	6	6
Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi	Jumlah Rapat	6	6
Pembinaan Pengelolaan Unit Usaha program Perhutanan social dan Kemitraan Bidang Kehutanan	Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang mendapat pendampingan	10	10
Monitoring dan evaluasi kegiatan Perhutanan Sosial	Jumlah monitoring dan evaluasi	5	5
Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan	Jumlah monitoring dan evaluasi	12	12
Pendampingan, pembentukkan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah kelompok tani hutan yang di bentuk	5	5
Pendampingan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan	Jumlah pendampingan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan	5	5
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang di latih	4	4
Temu teknis KTH	Jumlah Temu Teknis	1	0
Lomba Wana Lestari	Jumlah Kegiatan Lomba	1	0
Identifikasi, invetarisasi dan pemetaan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat	Jumlah Dokumen	5	5

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018
Fasilitasi Hutan adat yang di kelola oleh masyarakat adat	Jumlah Dokumen	4	4
Fasilitasi Inventarisasi dan pemetaan hutan untuk religi, budaya	Jumlah Dokumen	4	4
Monev. Pengelolaan Hutan Adat	JumlahLokasi permohonan Pengelolaan Hutan adat	1	1
Penanganan Konflik tenurial dan hutan adat	Jumlah sosialisasi pendampingan pengelolaan hutan adat	2	2

Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial pada tahun 2018 mendapat anggaran kegiatan dari APBD Murni TA. 2018 sebesar Rp. 740.000.000,00 hanya dapat untuk membiayai 2 kegiatan dari 15 Kegiatan yang dijalankan pada tahun 2018 yaitu Kegiatan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan Kegiatan Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi dimana danaKeberhasilan pencapaian target tersebut di atas karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan Mitra Dinas Kehutanan yaitu UPT Kemetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, LSM dalam melaksanakan kegiatan pada Program Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial .

Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan dan 9 UPTD Lingkup Dinas Kehutanan yaitu ; UPTD KPHP Kendilo yang berkedudukan di Tanah Grogot, UPTD KPHP Meratus yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP Bongan yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP DAS

Belayan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Santan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Bengalon yang berkedudukan di Sangata, UPTD KPHP Berau Barat yang berkedudukan di Tanjung Redeb dan UPTD Tahura Bukit Soeharto yang berkedudukan di Samarinda.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100 %. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN FISIK	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan	Jumlah jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	100	96,00	4

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Persentasi Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1.	Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan	13.000.000.000	**212.755.652.213,35**	246,89	Tidak tersedia anggaran	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Menurunnya luas kerusakan hutan	≤ 1,5	1,49	100	Tidak tersedia anggaran	Tidak ada	Tidak ada

3.	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	38.750	38.771,77	106	Tidak tersedia anggaran	Tidak ada	Tidak ada
4.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan	4	4	100	740.000.000,-	676.136.467,-	91,37 %

2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Program :**Tata Hutan dan Pemanfatan Kawasan	**1.192.000.000**	**0**	**0**	
	Kegiatan:				
	Sarana dan Prasarana Wisata Alam di KPH/Tahura/Hutan Kota (DAK)	1.192.000.000	0	0	
2	**Program perlindungan dan KSDAE**	**192.945.320.950**	**39.503.624.295**	**20,47**	
	Kegiatan :				
	Pembanguan Post Resort KPH (DAK)	6.050.000.000	0	0	
	Pembangunan Post Resort/Tahura (Dana Pendaping DAK)	491.800.000	370.329.000	75,28	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	139.588.260.354	25.835.177.064	18.51	
	Pelatihan/pembekalan/inhousetraing/ Penyegaran/Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) (DBH DR)	1.747.391.200	381.991.300	21.86	
	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	7.371.539.000	2.940.810.699	39.89	
	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	17.015.529.276	1.749.368.003	10.28	
	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan (DBH SDA DR)	2.840.378.200	861.951.236	30,35	
	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	6.377.900.200	408.783.902	6,41	
	Penaksiran Luas Kebakaran dan investigasi sebab-sebab kebakaran (DBH SDA DR)	1.835.850.000	340.227.685	18.53	
	Rekomendasi pelaksanaan Rehabilitasi areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	2.627.417.320	232.110.200	8.83	
	Patroli Pengamanan Hutan (DBH SDA DR)	6.999.260.800	1.643.567.006	23.48	
3	**Program Pengelolaan DAS dan RHL**	**47.364.565.500**	**8.765.375.131**	**18.51**	
	Kegiatan :				
	RHL Vegetatif untuk Pengelolaan	3.050.000.000	2.808.636.450	92,09	

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Kawasan Hutan (DAK)				
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping DBH SDA DR)	5.307.784.100	109.100.620	2,06	
	Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir (Dana Pendaping DBH DR)	527.805.000	500.000	0,09	
	Pelaksanaan RHL (DBH SDA DR)	36.436.256.400	5.521.584.561	15,15	
	Penyediaan Benih	221.200.000	76.689.000	34,67	
	Penyediaan Bibit	1.422.720.000	0	0	
	Pengedaran Benih dan Bibit	159.000.000	10.274.500		
	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit	239.800.000	238.590.000	99,50	
4	**Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial**	14.166.486.400	3.730.088.039	26,93	
	Kegiatan :				
	Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	734.000.000	672.951.467	91.68	
	Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi	6.000.000	3.185.000	53.08	
	Pendampingan Kegiatan RHL (DBH SDA DR)	643.600.000	241.332.640	37,50	
	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (DBH SDA DR)	929.200.000	307.653.560	33,11	
	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) (DBH SDA DR)	1.876016.200	281.183.300	14,99	
	Metode dan Materi Penyuluhan	497.270.000	0	0	
	Monev.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	494.800.000	286.042.216	57,81	
	Penyiapan Perhutanan Sosial	6.037.475.200	1.087.974.033	18,02	
	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1.005.300.000	202.275.641	20.12	
	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan adat	1.815.625.000	647.490.182	35,66	
	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat setempat	127.200.000	0	0	

Pada Tabel Realisasi Per Program dan kegiatan ini terdapat alokasi anggaran yang cukup besar yang terjadi dikarenakan telah ditambahkan dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) sejumlah 167.125.702.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang baru effektif

dilaksanakan pada bulan September 2018 sehingga di dapatkan realisasi anggaran dan fisik yang tidak optimal.

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2. Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

3. Fungsi :
   1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
   2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
   3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis tata Hutan dan Pemanfaatan kawasan
   4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan dan KSDAE
   5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan DAS dan RHL
   6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan
   7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
   8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
   10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan funsinya

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Jumlah DBH PNBP sektor kehutanan	menghitung jumlah pendapatan Dana bagi Hasil (DBH) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan	(Realsisasi PNBP PSDH & IIUPH x 16%) + (Realisasi PNBP DR x 40 %)	Dokumen Rekonsiliasi Per Triwulan dengan wajib bayar dan kementrian LHK
2	Menurunnya luas kerusakan hutan	Prosentase luas kerusakan hutan	Mengukur Luas Kerusakan lahan yang terjadi di dalam kawasan hutan	$\frac{\text{Jumlah Luas Kerusakan Hutan}}{\text{Jumlah Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$	1. Data Luas kebakaran Hutan 2. Data Illegal Logging 3. Data Luas kawasan Hutan
3	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Mengukur tutupan lahan pada lahan kritis dan terbuka yang ditanamai	Menghitung Luasan rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN dan APBD) ditambah luas penanaman yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya.	1. menghitung lahan kritis provinsi kaltim 2. Laporan penanaman oleh para pihak 3. Laporan permohonan bantuan bibit penghijauan lingkungan
4	Meningkatnya peran masyarakat di dalam dan atau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan	Jumlah jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	Mengukur jumlah jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	Menghitungjumlah jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN dan APBD)serta yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya.	1. Data Kelompok Masyarakat yang Menjalankan Perhutanan Sosial dan Kemitraan 2. Laporan Perusahaan yang menjalin Kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*		*4*
1	Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Jumlah DBH PNBP sektor kehutanan	Rp.	87.034.483.250
2	Menurunnya luas kerusakan hutan	Prosentase luas kerusakan hutan	%	≤ 1,3
3	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Ha	38.750
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan	Jumlah jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	Jenis Usaha	4

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.951.200.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	424.000.000	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	480.000.000	APBD
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	471.800.000	APBD
5	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Rp	175.481.987.100	APBD
6	Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan	Rp	-	APBD
7	Program perlindungan dan KSDAE	Rp	-	APBD
8	Program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan	Rp	734.000.000	APBD
		Rp	**179.542.987.100**	

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	1.578.925.000	APBN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*		*4*
1	Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Jumlah DBH PNBP sektor kehutanan	Rp.	87.034.483.250
2	Menurunnya luas kerusakan hutan	Prosentase luas kerusakan hutan	%	≤ 1,5
3	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Ha	38.750
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan	Jumlah jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	Jenis Usaha	4

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.951.200.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	424.000.000	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	480.000.000	APBD
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	471.800.000	APBD
5	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Rp	175.481.987.100	APBD
6	Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan	Rp	-	APBD
7	Program perlindungan dan KSDAE	Rp	-	APBD
8	Program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan	Rp	734.000.000	APBD
		Rp	**179.542.987.100**	

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	1.578.925.000	APBN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*		*4*
1	Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	M3	4.850.000
		Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	Ton	6

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	10.650.362.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	8.700.493.000	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp	6.115.695.000	APBD
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.774.590.000	APBD
5	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Rp	3.471.960.000	APBD
6	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Rp	1.194.850.000	APBD
7	Program perlindungan dan KSDAE	Rp	782.100.000	APBD
8	Program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan dan Perhutanan Sosial	Rp	2.330.970.000	APBD
9	Program Penyuluhan (DBH DR)	Rp	5.599.746.200	APBD
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Rp	25.936.050.800	APBD
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)	Rp	158.718.415.750	APBD
12	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Rp	15.904.857.275	APBD
13	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Rp	42.239.364.725	APBD
14	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Rp	5.551.083.000	APBD
15	Program Pengelolaan Tahura	Rp	320.400.000	APBD
16	Program Pengelolaan KPHP	Rp	7.915.020.000	APBD
		Rp	**297.205.957.750**	

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	500.500.000	APBN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun : 2019

SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN					KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
1. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah	1. Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	TW 1 : 1.000.000 TW 2 : 1.000.000 TW 3 : 1.000.000 TW 4 : 1.850.000 **4.850.000**	1. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1.	Pengawawsan dan pengendalian pengeolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan	Presentase realisasi produksi hasil hutan kayu (realisasi/target)	%	70	Rp 1.104.950.000	APBD
							Tersusunnya Perda Pembatasan penjualan Kayu Bulat	Dok	1		
					2.	Pendampingan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	Jumlah IUPHHK-HA yang menerapkan RIL/RIL C	UM	7	750.000.000	
					3	Pengolahan Hasil Hutan, pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Presentase Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen	%	75	796.510.000	
	2. Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 2 TW 4 : 2 **6**		4	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan	Dok	5	620.500.000	
					5	Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Dokumen Penyelesaian	Dok	5	200.000.000	
				2 Program Pengelolaan DAS dan RHL	1	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Jumlah DAS yang dimonitoring	DAS	3	660.850.000	
					2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	Ha	38.500	220.000.000	
					3	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah laporan peredaran dan pengadaan Bibit di Prov. Kaltim	Laporan	10	314.000.000	
				3 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	1	Pelaksanaan Rehabilitrasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Luas Penanaman	Ha	350	5.764.634.750	
				4 Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	1	Penyediaan Benih (DBH SDA DR)	Jumlah sertifikasi sumber benih	Sertifikasi	12	444.950.000	
					2	Pengedaran Benih dan Bibit (DBH SDA DR)	Jumlah SK Pengada dan Pengedar benih dan atau bibit	SK	15	284.200.000	
					3	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih (DBH SDA DR)	Jumlah bimbingan dan pengawasan	laporan	25	812.890.000	

SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN						KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN		
				5	Program perlindungan dan KSDAE	1	Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan	Luas hutan yang dimanfaatkan tanpa ijin yang semakin berkurang	Laporan	10	153.900.000	APBD
						2	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas areal kebakaran hutan yang semakin menurun	Ha	676	108.900.000	
						3	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Luas kawasan bernilai Konservasi tinggi yang meningkat	Ha	3.000	519.300.000	
				6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	1	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan perencanaan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan	Unit	917	7.249.117.100	
						2	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimbin	Jumlah kegiatan Bimtek/Pelatihan/Pembekalan/Inhouse Training	Kegiatan	12	1.484.500.000	
						3	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah laporan patroli	Laporan	21	1.080.835.000	
						4	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran	Jumlah penafsiran luas areal karhutla, investigasi penyebab kebakaran	Laporan	27	508.275.000	
						5	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/Kampanye	Kegiatan	10	1.279.350.000	
						6	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli pencegahan kebakaran	Kegiatan	70	992.500.000	
						7	Pemadaman kebakaran hutan dan lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Laporan	22	1.187.948.000	
						8	Rekomendasi pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas	Dokumen	33	576.900.000	
				7	Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH SDA DR)	1	Sosialisasi	Jumlah kegiatan sosialisasi pendampingan, dan fasilitasi	Laporan	20	200.000.000	
						2	Koordinasi	Jumlah laporan hasil penjagaan	Laporan	6	410.907.700	
						3	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	Laporan	24	931.132.000	

SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN						KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN		
				8	Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan	1	Penyuluhan Kehutanan	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi	Kelompok Tani Hutan	5	Rp 955.650.000	APBD
						2	Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha	35.000	Rp 955.320.000	
								Unit usaha masyarakat hutan	Unit	10		
						3	Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat	Luas pembinaan wilayah Hutan Adat / Hutan Hak	Ha	48,85	Rp 420.000.000	
				9	Penyuluhan (DBH SDA DR)		Pemberdayaan KTH (DBH SDA DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	Orang	50	Rp 608.228.000	
							Metode dan Materi Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Laporan Metode dan Materi Penyuluhan	Laporan	4	Rp 687.424.750	
							Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monev Kegiatan Penyuluh	Laporan	15	Rp 433.737.675	
				10	Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)		Penyiapan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi	Kegiatan	4	Rp 405.000.000	
							Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial	Kegiatan	6	Rp 385.945.000	
							Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (DBH DR)	Jumlah kegiatan penanganan konflik tenurial dan hutan adat	Laporan	4	Rp 749.941.000	

SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN						KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN		
				Operasional/program Generik/Overhead (Yang tidak mempunyai sasaran strategis)								
				1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12	Rp 1.818.986.000	APBD
				2.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	1	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Bulan	12	Rp 1.071.800.000	
						2	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Bulan	12	Rp 469.815.000	
				3.	Program peningkatan, kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Bulan	12	Rp 250.000.000	
						2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stell	580	Rp 452.900.000	
				4.	Program Penyusunan Dokumen perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Penyelenggaraan pemerintah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	10	Rp 629.350.000	
						2	Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah Dokumen laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	5	Rp 645.240.000	
						3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Dokumen	3	Rp 500.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah : **DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tahun : **2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*		*4*
1	Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4.850.000
		Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	TON	6

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT
JalanJenderalSudirman No. 1 Telp 733333 – 231 – 202
SAMARINDA

Samarinda, 07 Agustus 2018

Kepada

Nomor : 700/1410-Bid.Eko/Itprov/2018
Lampiran : 1 berkas LKE
Perihal : Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Yth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim
di -
Samarinda

Kami telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana perihal tersebut di atas.

Pemeriksaan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dengan hasil sebagai berikut :

1. Dasar Evaluasi
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
   b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
   c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
   d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang satuan Organisasi Perangkat Daerah.
   e. Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/060/INT/ITPROV/II/2017, 22 Pebruari 2017 Tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

f. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Kaltim Nomor : SPT/700/80-Bid.Eko/Itprov/2018 tanggal 02 April 2018.

2. Tujuan Evaluasi
   a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
   b. menilai tingkat implementasi SAKIP SKPD;
   c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Latar Belakang
   a. Tujuan dan sasaran dalam dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya belum berfokus/berorientasi hasil;
   b. Perjanjian Kinerja SKPD belum memperlihatkan ukuran kinerja yang baik;
   c. Laporan kinerja belum dapat menghubungkan antara kinerja dan hasil dengan sumber daya yang dimiliki.

4. Ruang Lingkup dan Metodologi Evaluasi
   a. Ruang lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Monitoring dan Evaluasi Kinerja; dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
   b. Metodologi evaluasi dengan teknik "*criteria referrenced survey*", menilai secara bertahap setiap komponen dengan kriteria evaluasi yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi.

5. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dan predikat D, C, CC, B, BB, A, AA dengan rincian sebagai berikut :
   a. Nilai 0 s.d. 30, predikat penilaian "D" (Sangat Kurang)
   b. Nila i > 30 s.d. 50, predikat penilaian "C" (Kurang)

c. Nilai > 50 s.d. 60, predikat penilaian "CC" (Cukup/Memadai)
d. Nilai > 60 s.d. 70, predikat penilaian "B" (Baik)
e. Nilai > 70 s.d. 80, predikat penilaian "BB" (Sangat Baik)
f. Nilai > 80 s.d. 90, predikat penilaian "A" (Memuaskan)
g. Nilai > 90 s.d. 100, predikat penilaian "AA" (Sangat Memuaskan)

6. Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 70,73 (*tujuh puluh koma tujuh puluh tiga*) atau dengan predikat penilaian "BB" (Sangat Baik), sebagaimana tabel berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2016	Nilai 2017	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	22,29	23,85	+1,56
2	Pengukuran Kinerja	25	19,69	19,06	-0,63
3	Pelaporan Kinerja	15	11,59	10,15	-1,44
4	Evaluasi Internal	10	6,17	6,04	-0,13
5	Pencapaian Kinerja	20	9,81	11,63	+1,82
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**69,54**	**70,73**	**+1,19**
	Kategori Penilaian		**B**	**BB**	

7. Penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, memiliki kategori "BB" dengan interprestasi Sangat Baik, (Akuntabel, bekerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal).

8. Hasil evaluasi implementasi SAKIP terhadap masing-masing komponen pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017, adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30% memperoleh nilai atau skor sebesar 23,85% dengan rincian sebagai berikut :

1) Perencanaan Strategis memperoleh nilai 7,90% dari nilai maksimal 10%, atau 78,96% yang terdiri dari:

a) Pemenuhan Renstra memperoleh nilai rata-rata 1,83 dari nilai maksimal 2% atau 91,67%

b) Kualitas Renstra memperoleh nilai rata-rata 4,06 dari nilai maksimal 5% atau 81,25%.

c) Implementasi Renstra memperoleh nilai rata-rata 2,00 dari nilai maksimal 3% atau 66,67%. Hal ini disebabkan, target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya.

2) Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai 15,95 dari nilai maksimal 20% atau 79,75% yang terdiri dari :

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai rata-rata 4 dari nilai maksimal 4% atau 100%.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai rata-rata 7,75% dari nilai maksimal 10% atau 77,50%. Hal ini disebabkan :

- Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang memadai.
- Dokumen PK belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai rata-rata 4,20 % dari nilai maksimal 6% atau 70,00%. Hal ini disebabkan :

- Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

b. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25% memperoleh nilai atau skor 19,06 dengan rincian sebagai berikut

1) Pemenuhan Pengukuran memperoleh nilai 5,00 dari nilai maksimal 5% atau 100%.

2) Kualitas Pengukuran memperoleh nilai 10,31 dari nilai maksimal 12,5% atau 82,50%.
3) Implementasi Pengukuran memperoleh nilai 3,75 dari nilai maksimal 7,5% atau 50,00%. Hal ini disebabkan :
   - Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
   - Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian kinerja secara berkala.

c. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15% memperoleh nilai atau skor sebesar 10,15 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemenuhan Laporan memperoleh nilai 2,81% dari nilai maksimal 3% atau 93,75%.
2) Penyajian Informasi Kinerja memperoleh nilai 4,64% dari nilai maksimal 7,5% atau 61,86%. Hal ini disebabkan :
   - Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan belum menyajikan informasi tentang analisis efesien penggunaan sumber daya.
   - Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
3) Pemanfaatan Informasi Kinerja memperoleh nilai 2,70% dari nilai maksimal 4,5% atau 60,00%. Hal ini disebabkan :
   - Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
   - Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi Internal dengan bobot penilaian sebesar 10% memperoleh nilai atau skor sebesar 6,04 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pemenuhan Evaluasi Internal memperoleh nilai 1,63 dari nilai maksimal 2% atau 81,25%. Hal ini disebabkan hasil evaluasi belum dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/terkait.
2) Kualitas Evaluasi internal memperoleh nilai 2,92 dari nilai maksimal 5% atau 58,33%. Hal ini disebabkan :
   - Pemantauan Rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
   - Hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode.
3) Pemanfaatan Evaluasi internal memperoleh nilai 1,50 dari nilai maksimal 3% atau 50%. Hal ini disebabkan hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Pencapaian sasaran/kinerja organisasi dengan bobot penilaian sebesar 20% memperoleh nilai atau skor sebesar 11,63% dengan rincian sebagai berikut :

1) Kinerja yang dilaporkan (Output) memperoleh nilai 3,50 dari nilai maksimal 7,50% atau 46,67%, dengan rincian penilaian sebagai berikut:
   a) Target dapat dicapai mendapat nilai 2,00.
   b) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya mendapat nilai 0,50.
   c) Informasi mengenai kinerja *dapat* diandalkan mendapat nilai 1,00
2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome) memperoleh nilai 8,13% dari nilai maksimal 12,5% atau 65,00%, dengan rincian penilaian sebagai berikut :

a) Target dapat dicapai mendapat nilai 4,06
b) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya mendapat nilai 1,56
c) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan mendapat nilai 2,50.

9. Rekomendasi

Terhadap kondisi di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, beserta seluruh jajaran agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja :
   - Target jangka menengah dalam Renstra supaya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
   - Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran agar didukung dengan anggaran yang memadai.
   - Dokumen PK supaya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).
   - Rencana Aksi atas kinerja supaya dimonitor pencapaiannya secara berkala.
   - Rencana Aksi agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja :
   - Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas supaya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
   - Pengukuran kinerja atas rencana aksi agar digunakan untuk pengendalian kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja :
   - Laporan kinerja supaya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan menyajikan informasi tentang analisis efesien penggunaan sumber daya.
   - Informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat diandalkan.

- Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- Informasi yang disajikan supaya digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal :
   - Hasil evaluasi agar dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/terkait.
   - Pemantauan Rencana aksi agar dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
   - Hasil evaluasi rencana aksi agar memberikan perbaikan setiap periode.
   - Hasil evaluasi rencana aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Kinerja :
   - Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya
   - Informasi mengenai kinerja agar dapat diandalkan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur,

M. Sa'duddin
Pembina Utama Madya
NIP 19640519 198503 1 001

TembusanYth :
1. GubernurProvinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim di Samarinda
4. Kepala Biro Organisasi Setdaprov. Kaltim di Samarinda
5. Arsip

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	79,49%	23,85	
I.	**PERENCANAAN STRATEGIS (10%)**	**10,00**	**78,96%**	**7,90**	
a.	**PEMENUHAN RENSTRA (2%)**	**2,00**	**91,67%**	**1,83**	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		B	0,75	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		B	0,75	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		B	0,75	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b.	**KUALITAS RENSTRA (5%)**	**5,00**	**81,25%**	**4,06**	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		B	0,75	OK
12	Sasaran telah ***berorientasi hasil***		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK
c.	**IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)**	**3,00**	**66,67%**	**2,00**	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		C	0,50	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75	OK
II.	**PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)**	**20,00**	**79,75%**	**15,95**	
a.	**PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)**	**4,00**	**100,00%**	**4,00**	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b.	**KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)**	**10,00**	**77,50%**	**7,75**	
5	Sasaran telah ***berorientasi hasil***		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		C	0,50	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0,75	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		C	0,50	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0,75	OK

14	Rencana Aksi atas kinerja telah *mencantumkan sub kegiatan/* komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
c.	**IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)**	**6,00**	**70,00%**	**4,20**	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		C	0,50	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		C	0,50	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK
B.	**PENGUKURAN KINERJA (25%)**	**25,00**	**76,25%**	**19,06**	
I.	**PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)**	**5,00**	**100,00%**	**5,00**	
1	Telah terdapat *indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal*		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II.	**KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)**	**12,50**	**82,50%**	**10,31**	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		B	0,75	OK
6	IKU telah ***cukup untuk mengukur*** kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
III.	**IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)**	**7,50**	**50,00%**	**3,75**	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*		C	0,50	OK
19	IKU telah ***direviu secara berkala***		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		C	-	OK
C.	**PELAPORAN KINERJA (15%)**	**15,00**	**67,68%**	**10,15**	
I.	**PEMENUHAN PELAPORAN (3%)**	**3,00**	**93,75%**	**2,81**	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK
II.	**PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)**	**7,50**	**61,86%**	**4,64**	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75	OK

8	Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan		C	0,50	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK
III.	**PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)**	**4,50**	**60,00%**	**2,70**	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan ***telah digunakan dalam perbaikan perencanaan***		C	0,50	OK
14	Informasi yang disajikan telah ***digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi***		C	0,50	OK
15	Informasi yang disajikan ***telah digunakan untuk peningkatan kinerja***		C	0,50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		**10,00**	**60,42%**	**6,04**	
I.	**PEMENUHAN EVALUASI (2%)**	**2,00**	**81,25%**	**1,63**	
1	***Terdapat pemantauan mengenai kemajuan*** pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00	
2	***Evaluasi program*** telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,75	OK
4	***Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan*** kepada pihak-pihak yang berkepentingan		C	0,50	OK
II.	**KUALITAS EVALUASI (5%)**	**5,00**	**58,33%**	**2,92**	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		D	-	OK
III.	**PEMANFAATAN EVALUASI (3%)**	**3,00**	**50,00%**	**1,50**	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		D	0,25	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		**20,00**	**58,13%**	**11,63**	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	**7,50**	**46,67%**	**3,50**	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1,00	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	**12,50**	**65,00%**	**8,13**	
4	Target dapat dicapai			4,06	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,56	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2,50	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		**100,00**	**70,73%**	**70,73**	

RESUME KINERJA PER KPA APBD 2018 - PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SKPD : DINAS KEHUTANAN

FORMAT C

No.	Nama KPA	Pagu		Nilai Kontrak		Sisa Pagu	Realisasi (Rp)		Realisasi (%)				Status			
									Nov		Des					
		Pkt	Rp	Pkt	Rp		Fisik	Keu/SP2D	Fisik	Keu	Fisik	Keu	B	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Total	276	378.779.640.350,00	276	242.073.268.261,00	136.706.372.089,00	150.912.488.728,49	150.309.626.225,50	**42,33**	**26,76**	**62,34**	**39,68**	142	5	8	121
	BTL	1	114.728.803.000,00	1	114.728.803.000,00	--	90.627.967.092,00	90.627.967.092,00	**70,64**	**70,64**	**78,99**	**78,99**	--	1	--	--
	Dinas Kehutanan (BL)	275	264.050.837.350,00	275	127.344.465.261,00	136.706.372.089,00	60.284.521.636,49	59.681.659.133,50	**16,83**	**7,70**	**47,34**	**22,60**	142	4	8	121
1	Ir. Herry Maryadi	3	881.800.000,00	3	881.300.000,00	500.000,00	881.300.000,00	876.815.419,00	92,02	83,05	100,00	99,43	3	0	--	0
2	Ir. Herry Maryadi/ Ir. H. Wahyudi, MP/ Ir. H. D. Momo/ Ir.Alfaret D.Simbolon,M.Si/ Ir. Rini Endah.L.,MP/ Ir. M. Hazairin Fahmi/ H.Susilo P,S.Hut,.M.Si/ H.Eddy R.SH.,MM/ Drs.H.Akli, M.Si/ Christianus Benny, S.Hut. M.H/ Ir. Azhar Rudiyanto/ H. Rusmadi, S.Hut.,M.Si/ Armilan Saidi, S.Hut., MP	272	263.169.037.350,00	272	126.463.165.261,00	136.705.872.089,00	59.403.221.636,49	58.804.843.714,50	16,30	7,45	46,97	22,34	139	4	8	121

AKTIFITAS KPA APBD 2018 - PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SKPD : DINAS KEHUTANAN

FORMAT C1

Jabatan	Nama / HP	KPA BIDANG SEKRETARIAT				Total						
KPA	Ir. Herry Maryadi / 082234653678					Rp 881.800.000						3 Pkt
No	Kegiatan / Paket Pekerjaan	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Sisa Pagu	Realisasi (Rp)		Realisasi (%)				Status
								Nov		Des		
						Fisik	Keu/SP2D	Fis	Keu	Fis	Keu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Total		881.800.000,00	881.300.000,00	500.000,00	881.300.000,00	876.815.419,00	92,02	83,05	100,00	99,43	--
1	KPA : Ir. Herry Maryadi		0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	PPTK : H. Joko Istanto, SP., M.Si											
2	Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Renstra Dinas	PL / NK	50.000.000,00	49.500.000,00	500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	0,00	100,00	99,00	B
3	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi P	SWAP / NK	464.100.000,00	464.100.000,00	0,00	464.100.000,00	459.965.774,00	91,04	86,61	100,00	99,11	B
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	SWAP / NK	367.700.000,00	367.700.000,00	0,00	367.700.000,00	367.349.645,00	92,18	89,85	100,00	99,90	B

AKTIFITAS KPA APBD 2018 - PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SKPD : DINAS KEHUTANAN

FORMAT C1

Jabatan	Nama / HP	KPA BIDANG SEKRETARIAT, BIDANG DINAS & UPTD KPHP				Total						
KPA	Susilo P,S.Hut,.M.Si/ H.Eddy R.SH.,MM/ Drs.H.Akli, M					Rp 263.169.037.350						272 Pkt
No	Kegiatan / Paket Pekerjaan	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Sisa Pagu	Realisasi (Rp)		Realisasi (%)				Status
								Nov		Des		
						Fisik	Keu/SP2D	Fis	Keu	Fis	Keu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Total		263.169.037.350,00	126.463.165.261,00	136.705.872.089,00	59.403.221.636,49	58.804.843.714,50	16,30	7,45	46,97	22,34	--
1	KPA : Ir. Herry Maryadi/ Ir. H. Wahyudi, MP/ Ir. H. D. Momo/ Ir.A		0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	PPTK : Imon, S.Hut., MP/ Dadang Kurnia, S.P./ Shahar Al Haqq,SP.,M.Si/ Dadang Rukmana,S.hut/ H.Johnny F,SE/ Aries Pudji Hadi,S.Hut.,MIDS,M.Eng/ Chairudin, S.Hut/ Fredy Rahmat Santoso, S.Hut.											
2	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan (KPHP Sa	SU / NK	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
3	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Rancangan Te	SU / NK	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
4	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Rancangan Te	SU / NK	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
5	Belanja Jasa Konsultasi Rancangan Kegiatan RHL di	SU / NK	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
6	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Dinas Kehutanan da	LU / NK	11.097.880.000,00	0,00	11.097.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	LU / NK	11.013.500.000,00	0,00	11.013.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	PML / K	1.134.750.000,00	0,00	1.134.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
9	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman UPTD KPHP Delta M	LS / NK	940.000.000,00	921.299.500,00	18.700.500,00	921.299.500,00	921.299.500,00	100,00	98,01	100,00	98,01	B
10	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman UPTD KPHP Bongan	LS / NK	1.855.000.000,00	1.724.800.000,00	130.200.000,00	1.724.800.000,00	1.724.800.000,00	100,00	92,98	100,00	92,98	B
11	Belanja Modal Pembangunan Kantor Resort KPHP	PML / K	2.090.000.000,00	1.982.120.000,00	107.880.000,00	1.982.120.000,00	1.982.120.000,00	100,00	61,64	100,00	94,84	B
12	Belanja Modal Pembangunan Kantor Resort KPHP	PML / K	1.045.000.000,00	0,00	1.045.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
13	Belanja Modal Pembangunan Kantor Resort KPHP	PML / K	1.567.500.000,00	1.497.740.000,00	69.760.000,00	1.497.740.000,00	1.497.740.000,00	100,00	95,55	100,00	95,55	B
14	Belanja Modal Pembangunan Kantor Resort KPHP	PML / K	1.045.000.000,00	1.009.376.000,00	35.624.000,00	1.009.376.000,00	1.009.376.000,00	100,00	72,48	100,00	96,59	B
15	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pe	LS / NK	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
16	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pe	LS / NK	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
17	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pe	LS / NK	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
18	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pe	LS / NK	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
19	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pe	LS / NK	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
20	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pe	LS / NK	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
21	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pe	LS / NK	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
22	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pe	LS / NK	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
23	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pe	LS / NK	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
24	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pe	LS / NK	484.500.000,00	0,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
25	Pengadaan Persemaian Permanen (KENDILO) (revi	LS / K	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
26	Pengadaan Persemaian Permanen (BERAU BARAT)	LS / K	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
27	Belanja Jasa Konsultasi Review Rancangan Kegiata	SS / NK	112.500.000,00	96.140.000,00	16.360.000,00	96.140.000,00	96.140.000,00	100,00	85,46	100,00	85,46	B
28	Belanja Pupuk Kegiatan Pembangunn hutan rakyat	LS / NK	218.750.000,00	0,00	218.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
29	Belanja Bahan / Bibit Tanaman (KPHP DAS BELAYA	LS / NK	1.101.200.000,00	0,00	1.101.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
30	Belanja Bahan / Bibit Tanaman (KPHP DAS BELAYA	LS / NK	775.950.000,00	0,00	775.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
31	Belanja Pupuk Kegiatan Pembangunn hutan rakyat	LS / NK	218.750.000,00	0,00	218.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
32	Rehablitasi Mangrove di PPU (Dinas) (DBH SDA D	LS / NK	550.600.000,00	0,00	550.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
33	Rehablitasi Mangrove di Kutai Kartanegara (Dinas	LS / NK	550.600.000,00	0,00	550.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
34	Belanja Bibit Kegiatan Pembangunan Hutan Rakya	LS / NK	412.800.000,00	0,00	412.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
35	Belanja Bibit Kegiatan Pembangunan Hutan Rakya	LS / NK	412.800.000,00	0,00	412.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
36	Reboisasi di wilayah KPHP Bengalon di Hutan Lind	LS / NK	3.879.750.000,00	3.762.357.500,00	117.392.500,00	3.762.357.500,00	3.762.357.500,00	0,00	0,00	100,00	96,97	B
37	Belanja Bahan / Bibit Tanaman (KPHP SANTAN) V	LS / NK	3.414.180.000,00	0,00	3.414.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	LS / NK	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
39	Cleaning Service (Dinas)	LS / NK	450.000.000,00	423.250.000,00	26.750.000,00	423.250.000,00	423.250.000,00	100,00	78,51	100,00	94,06	B
40	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Dinas Kehutanan	LS / NK	437.500.000,00	0,00	437.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
41	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan (RANTEK)	LS / NK	1.285.000.000,00	0,00	1.285.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M

42	Belanja Pengadaan Peralatan Tangan Pemadam Ke	LS / NK	1.809.750.000,00	0,00	1.809.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
43	Belanja Pengadaan Perlengkapan Pribadi Pemadar	LS / NK	2.793.000.000,00	0,00	2.793.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
44	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangun	PL / NK	60.000.000,00	58.993.000,00	1.007.000,00	58.993.000,00	58.993.000,00	0,00	0,00	100,00	98,32	B
45	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan UPTD KPHP	PL / NK	25.000.000,00	24.447.500,00	552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
46	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan UPTD KPHP I	PL / NK	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
47	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangun	PL / NK	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
48	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangun	PL / NK	120.000.000,00	114.587.500,00	5.412.500,00	114.587.500,00	114.587.500,00	100,00	95,49	100,00	95,49	B
49	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangun	PL / NK	60.000.000,00	57.500.000,00	2.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	100,00	95,83	100,00	95,83	B
50	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangun	PL / NK	90.000.000,00	87.191.500,00	2.808.500,00	87.191.500,00	87.191.500,00	100,00	96,88	100,00	96,88	B
51	Pembuatan tempat cuci piring aula (Aula Dinas) (R	PL / K	50.000.000,00	49.500.000,00	500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	99,00	100,00	99,00	B
52	Pengecatan / Pengapuran Gedung Aula (Dinas Keh	PL / NK	180.000.000,00	179.500.000,00	500.000,00	179.500.000,00	179.500.000,00	100,00	99,72	100,00	99,72	B
53	Belanja kaos dan topi (HMPI 2018)	PL / NK	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
54	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangun	PL / NK	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
55	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangun	PL / NK	80.000.000,00	78.634.000,00	1.366.000,00	78.634.000,00	78.634.000,00	0,00	0,00	100,00	98,29	B
56	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangun	PL / NK	20.000.000,00	19.500.000,00	500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	100,00	97,50	B
57	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan (RANTEK)	PL / NK	45.000.000,00	43.560.000,00	1.440.000,00	43.560.000,00	43.560.000,00	100,00	96,80	100,00	96,80	B
58	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan (RANTEK)	PL / NK	45.000.000,00	43.857.000,00	1.143.000,00	43.857.000,00	43.857.000,00	100,00	97,46	100,00	97,46	B
59	Pemeliharaan gedung aula UPTD KPHP Kendilo	PL / K	82.000.000,00	81.700.000,00	300.000,00	81.700.000,00	81.700.000,00	100,00	99,63	100,00	99,63	B
60	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangun	PL / NK	20.000.000,00	19.500.000,00	500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	100,00	97,50	B
61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	URCHASING /	2.576.975.000,00	0,00	2.576.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	URCHASING /	1.372.975.000,00	0,00	1.372.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	URCHASING /	2.576.975.000,00	0,00	2.576.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	URCHASING /	2.576.975.000,00	0,00	2.576.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
65	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	URCHASING /	1.305.725.000,00	0,00	1.305.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
66	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
67	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	150.000.000,00	147.064.500,00	2.935.500,00	147.064.500,00	147.064.500,00	0,00	0,00	100,00	98,04	B
68	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	100.000.000,00	98.322.400,00	1.677.600,00	98.322.400,00	98.322.400,00	0,00	0,00	100,00	98,32	B
69	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	100.000.000,00	80.520.000,00	19.480.000,00	80.520.000,00	80.520.000,00	0,00	0,00	100,00	80,52	B
70	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	100.000.000,00	97.222.000,00	2.778.000,00	97.222.000,00	97.222.000,00	0,00	0,00	100,00	97,22	B
71	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	100.000.000,00	99.110.000,00	890.000,00	99.110.000,00	99.110.000,00	0,00	0,00	100,00	99,11	B
72	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Doub	URCHASING /	1.500.000.000,00	1.233.778.177,00	266.221.823,00	1.233.778.177,00	1.233.778.177,00	0,00	0,00	100,00	82,25	B
73	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Doub	URCHASING /	1.500.000.000,00	1.427.790.000,00	72.210.000,00	1.427.790.000,00	1.427.790.000,00	0,00	0,00	100,00	95,19	B
74	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Doub	URCHASING /	1.500.000.000,00	1.242.278.177,00	257.721.823,00	1.242.278.177,00	1.242.278.177,00	0,00	0,00	100,00	82,82	B
75	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Doub	URCHASING /	1.500.000.000,00	1.339.250.000,00	160.750.000,00	1.339.250.000,00	1.339.250.000,00	0,00	0,00	100,00	89,28	B
76	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Doub	URCHASING /	1.000.000.000,00	863.320.000,00	136.680.000,00	863.320.000,00	863.320.000,00	0,00	0,00	100,00	86,33	B
77	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Radio RIG d	PL / NK	190.000.000,00	186.694.000,00	3.306.000,00	186.694.000,00	186.694.000,00	0,00	0,00	100,00	98,26	B
78	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Radio RIG d	PL / NK	190.000.000,00	186.694.000,00	3.306.000,00	186.694.000,00	186.694.000,00	0,00	0,00	100,00	98,26	B
79	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Radio RIG d	PL / NK	190.000.000,00	154.770.000,00	35.230.000,00	154.770.000,00	154.770.000,00	0,00	0,00	100,00	81,46	B
80	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Radio RIG d	PL / NK	190.000.000,00	186.694.000,00	3.306.000,00	186.694.000,00	186.694.000,00	0,00	0,00	100,00	98,26	B
81	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Radio RIG d	PL / NK	190.000.000,00	188.320.000,00	1.680.000,00	188.320.000,00	188.320.000,00	0,00	0,00	100,00	99,12	B
82	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Radio RIG d	PL / NK	190.000.000,00	186.694.000,00	3.306.000,00	186.694.000,00	186.694.000,00	0,00	0,00	100,00	98,26	B
83	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Radio RIG d	PL / NK	190.000.000,00	186.694.000,00	3.306.000,00	186.694.000,00	186.694.000,00	0,00	0,00	100,00	98,26	B
84	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Radio RIG d	PL / NK	190.000.000,00	106.000.000,00	84.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	100,00	55,79	B
85	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Radio RIG d	PL / NK	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
86	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Radio RIG d	PL / NK	190.000.000,00	186.694.000,00	3.306.000,00	186.694.000,00	186.694.000,00	0,00	0,00	100,00	98,26	B
87	Belanja Pengadaan Software Fotogrametri (Dinas)	PL / NK	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
88	Belanja Pengadaan Monitor Display Kegiatan PKHL	PL / NK	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
89	Belanja Pengadaan Printer (UPTD KPHP Berau Bara	URCHASING /	434.000.000,00	418.201.700,00	15.798.300,00	418.201.700,00	418.201.700,00	0,00	0,00	100,00	96,36	B
90	Belanja Pengadaan Printer (UPTD KPHP Bongan) (F	URCHASING /	242.500.000,00	238.702.000,00	3.798.000,00	238.702.000,00	238.702.000,00	0,00	0,00	100,00	98,43	B
91	Belanja Pengadaan Printer (UPTD KPHP Meratus) (	URCHASING /	217.000.000,00	214.450.800,00	2.549.200,00	214.450.800,00	214.450.800,00	0,00	0,00	100,00	98,83	B
92	Belanja Pengadaan Printer (UPTD KPHP Kendilo) (F	URCHASING /	427.000.000,00	419.409.500,00	7.590.500,00	419.409.500,00	419.409.500,00	0,00	0,00	100,00	98,22	B
93	Belanja Pengadaan Printer (UPTD KPHP Santan) (R	URCHASING /	208.500.000,00	206.850.400,00	1.649.600,00	206.850.400,00	206.850.400,00	0,00	0,00	100,00	99,21	B
94	Belanja Pengadaan Printer (UPTD KPHP Belayan) (I	URCHASING /	225.500.000,00	223.701.700,00	1.798.300,00	223.701.700,00	223.701.700,00	0,00	0,00	100,00	99,20	B
95	Belanja Pengadaan Printer (UPTD KPHP Bengalon)	URCHASING /	225.500.000,00	223.601.200,00	1.898.800,00	223.601.200,00	223.601.200,00	0,00	0,00	100,00	99,16	B

96	Belanja Pengadaan Printer (UPTD KPHP Batu Ayau	URCHASING /	454.000.000,00	444.617.600,00	9.382.400,00	444.617.600,00	444.617.600,00	0,00	0,00	100,00	97,93	B
97	Belanja Pengadaan Printer (UPTD Tahura) (Revisi D	URCHASING /	242.500.000,00	240.252.000,00	2.248.000,00	240.252.000,00	240.252.000,00	0,00	0,00	100,00	99,07	B
98	Belanja Pengadaan Printer (Dinas) (Revisi DBH SDA	URCHASING /	225.500.000,00	223.101.200,00	2.398.800,00	223.101.200,00	223.101.200,00	0,00	0,00	100,00	98,94	B
99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	150.000.000,00	149.308.000,00	692.000,00	149.308.000,00	149.308.000,00	0,00	0,00	100,00	99,54	B
100	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	150.000.000,00	148.285.000,00	1.715.000,00	148.285.000,00	148.285.000,00	0,00	0,00	100,00	98,86	B
101	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	100.000.000,00	97.000.000,00	3.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	100,00	97,00	B
102	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	100.000.000,00	99.011.000,00	989.000,00	99.011.000,00	99.011.000,00	0,00	0,00	100,00	99,01	B
103	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	100.000.000,00	98.043.000,00	1.957.000,00	98.043.000,00	98.043.000,00	0,00	0,00	100,00	98,04	B
104	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	PL / NK	100.000.000,00	97.900.000,00	2.100.000,00	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	100,00	97,90	B
105	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
106	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	600.000.000,00	454.800.000,00	145.200.000,00	454.800.000,00	454.800.000,00	0,00	0,00	100,00	75,80	B
107	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	640.000.000,00	485.120.000,00	154.880.000,00	485.120.000,00	485.120.000,00	0,00	0,00	100,00	75,80	B
108	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	600.000.000,00	454.800.000,00	145.200.000,00	454.800.000,00	454.800.000,00	0,00	0,00	100,00	75,80	B
109	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	600.000.000,00	495.616.650,00	104.383.350,00	495.616.650,00	495.616.650,00	0,00	0,00	100,00	82,60	B
110	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	520.000.000,00	421.734.430,00	98.265.570,00	421.734.430,00	421.734.430,00	0,00	0,00	100,00	81,10	B
111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	600.000.000,00	486.616.650,00	113.383.350,00	486.616.650,00	486.616.650,00	0,00	0,00	100,00	81,10	B
112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	600.000.000,00	516.463.050,00	83.536.950,00	516.463.050,00	516.463.050,00	0,00	0,00	100,00	86,08	B
113	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
114	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	160.000.000,00	121.280.000,00	38.720.000,00	121.280.000,00	121.280.000,00	0,00	0,00	100,00	75,80	B
115	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	3.700.000.000,00	0,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
116	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	3.700.000.000,00	0,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
117	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	2.850.000.000,00	0,00	2.850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
118	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	4.700.000.000,00	0,00	4.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	3.700.000.000,00	0,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
120	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	4.700.000.000,00	0,00	4.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
121	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	3.700.000.000,00	0,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	3.700.000.000,00	0,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
123	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	4.700.000.000,00	0,00	4.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
124	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
125	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Doub	URCHASING /	1.500.000.000,00	1.294.980.000,00	205.020.000,00	1.294.980.000,00	1.294.980.000,00	0,00	0,00	100,00	86,33	B
126	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Doub	URCHASING /	1.500.000.000,00	1.294.980.000,00	205.020.000,00	1.294.980.000,00	1.294.980.000,00	0,00	0,00	100,00	86,33	B
127	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Doub	URCHASING /	1.500.000.000,00	1.339.250.000,00	160.750.000,00	1.339.250.000,00	1.339.250.000,00	0,00	0,00	100,00	89,28	B
128	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Doub	URCHASING /	1.500.000.000,00	1.241.278.177,00	258.721.823,00	1.241.278.177,00	1.241.278.177,00	0,00	0,00	100,00	82,75	B
129	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Doub	URCHASING /	1.500.000.000,00	1.294.980.000,00	205.020.000,00	1.294.980.000,00	1.294.980.000,00	0,00	0,00	100,00	86,33	B
130	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan Penanam	PL / NK	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
131	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan Penanam	PL / NK	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
132	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan Penanam	PL / NK	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
133	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan (KPHP Bo	PL / NK	45.000.000,00	43.857.000,00	1.143.000,00	43.857.000,00	43.857.000,00	0,00	0,00	100,00	97,46	B
134	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan (KPHP Me	PL / NK	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
135	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan Penanam	PL / NK	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
136	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan (UPTD Ta	PL / NK	45.000.000,00	44.990.000,00	10.000,00	44.990.000,00	44.990.000,00	0,00	0,00	100,00	99,98	B
137	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Pers	PL / NK	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
138	Belanja Jasa Konsultan Perencana Pembuatan Per	PL / NK	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
139	Belanja Konsultan Pengawas Pembuatan Persemai	PL / NK	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
140	Belanja Perencanaan Pembuatan Persemaian Perr	PL / NK	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
141	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan Hutan Ra	PL / NK	35.000.000,00	30.745.000,00	4.255.000,00	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	100,00	87,84	B
142	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan Hutan Ra	PL / NK	35.000.000,00	30.745.000,00	4.255.000,00	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	100,00	87,84	B
143	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan Rehabilita	PL / NK	22.500.000,00	22.385.000,00	115.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00	0,00	0,00	100,00	99,49	B
144	Belanja Pembuatan Rancangan Kegiatan Rehabilita	PL / NK	22.500.000,00	22.385.000,00	115.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00	0,00	0,00	100,00	99,49	B
145	Belanja Cetak (Buku, Majalah Leaflet, Booklet dan	PL / NK	160.820.000,00	0,00	160.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
146	Pemeliharaan Perbaikan gedung dan Bangunan Ka	PL / NK	60.000.000,00	20.900.000,00	39.100.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	100,00	34,83	B
147	Belanja Kaos dan Topi HMPI 2018 (Dinas) (revisi DI	PL / NK	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
148	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengaadan A	PL / NK	35.000.000,00	34.630.750,00	369.250,00	34.630.750,00	34.630.750,00	0,00	0,00	100,00	98,95	B
149	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan M	PL / NK	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M

150	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan N	PL / NK	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
151	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan N	PL / NK	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
152	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan N	PL / NK	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
153	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	URCHASING /	2.576.975.000,00	0,00	2.576.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
154	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	URCHASING /	2.576.975.000,00	0,00	2.576.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
155	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	URCHASING /	2.576.975.000,00	0,00	2.576.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
156	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	URCHASING /	2.576.975.000,00	0,00	2.576.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
157	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A	URCHASING /	2.576.975.000,00	0,00	2.576.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
158	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	PL / NK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
159	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	PL / NK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
160	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	PL / NK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
161	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	PL / NK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
162	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	PL / NK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
163	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	PL / NK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
164	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	PL / NK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
165	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	PL / NK	50.000.000,00	49.500.000,00	500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	100,00	99,00	B
166	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	PL / NK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
167	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	PL / NK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
168	Belanja Jasa Publikasi (Brosur, Leaflet, Spanduk, St	PL / NK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
169	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Ha	PL / NK	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
170	Belanja Pengadaan Mesin Panen Madu (KENDILO)	PL / NK	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
171	Belanja Pengadaan Mesin Perontok Padi (KENDILO	PL / NK	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
172	Belanja Pakaian Seragam Tertentu Dinas Kehutana	PL / NK	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
173	Belanja Cetak Dinas Kehutanan dan UPTD (ABT DB	PL / NK	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
174	Belanja Pengadaan printer untuk Penyajian Data In	URCHASING /	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
175	Belanja Pengadaan komputer note book/laptop ur	URCHASING /	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
176	Belanja Pengadaan Kamera Dinas Kehutanan dan U	PL / NK	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
177	Belanja Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) Ha	PL / NK	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
178	Belanja Pengadaan Alat GPS untuk kegiatan patrol	URCHASING /	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
179	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan a	URCHASING /	21.000.000.000,00	0,00	21.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
180	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan K	URCHASING /	920.000.000,00	0,00	920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
181	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	URCHASING /	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
182	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	URCHASING /	720.000.000,00	0,00	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
183	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan M	PL / NK	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
184	Belanja Modal Peralatandan Mesin - Pengadaan Pe	URCHASING /	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
185	Belanja Modal Peralatandan Mesin - Pengadaan Pe	URCHASING /	20.000.000,00	15.827.850,00	4.172.150,00	15.827.850,00	15.827.850,00	0,00	0,00	100,00	79,14	B
186	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	URCHASING /	120.000.000,00	115.801.920,00	4.198.080,00	115.801.920,00	115.801.920,00	0,00	0,00	100,00	96,50	B
187	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan P	URCHASING /	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
188	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan N	URCHASING /	54.000.000,00	53.997.600,00	2.400,00	53.997.600,00	53.997.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
189	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan M	URCHASING /	50.000.000,00	46.800.320,00	3.199.680,00	46.800.320,00	46.800.320,00	0,00	0,00	100,00	93,60	B
190	Pengadaan Laptop Kegiatan PKHL (Dinas) (Revisi D	URCHASING /	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
191	Pengadaan Laptop Kegiatan PKHL (UPTD Tahura) (U	URCHASING /	80.000.000,00	78.930.160,00	1.069.840,00	78.930.160,00	78.930.160,00	0,00	0,00	100,00	98,66	B
192	Pengadaan Laptop Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Ber	URCHASING /	80.000.000,00	77.960.960,00	2.039.040,00	77.960.960,00	77.960.960,00	0,00	0,00	100,00	97,45	B
193	Pengadaan Laptop Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Bor	URCHASING /	80.000.000,00	79.596.800,00	403.200,00	79.596.800,00	79.596.800,00	0,00	0,00	100,00	99,50	B
194	Pengadaan Laptop Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Me	URCHASING /	80.000.000,00	73.598.720,00	6.401.280,00	73.598.720,00	73.598.720,00	0,00	0,00	100,00	92,00	B
195	Pengadaan Laptop Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Ker	URCHASING /	80.000.000,00	72.868.400,00	7.131.600,00	72.868.400,00	72.868.400,00	0,00	0,00	100,00	91,09	B
196	Pengadaan Laptop Kegiatan PKHL (UPTD KPHP San	URCHASING /	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
197	Pengadaan Laptop Kegiatan PKHL (UPTD KPHP DAS	URCHASING /	80.000.000,00	76.260.320,00	3.739.680,00	76.260.320,00	76.260.320,00	0,00	0,00	100,00	95,33	B
198	Pengadaan Laptop Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Ber	URCHASING /	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
199	Pengadaan Laptop Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Bat	URCHASING /	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
200	Pengadaan Kamera Opersional Kegiatan PKHL (Din	URCHASING /	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
201	Pengadaan Kamera Opersional Kegiatan PKHL (UP	URCHASING /	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
202	Pengadaan Kamera Opersional Kegiatan PKHL (UP	URCHASING /	20.000.000,00	19.575.600,00	424.400,00	19.575.600,00	19.575.600,00	0,00	0,00	100,00	97,88	B
203	Pengadaan Kamera Opersional Kegiatan PKHL (UP	URCHASING /	20.000.000,00	19.575.600,00	424.400,00	19.575.600,00	19.575.600,00	0,00	0,00	100,00	97,88	B

204	Pengadaan Kamera Opersional Kegiatan PKHL (UP	URCHASING /	20.000.000,00	19.575.600,00	424.400,00	19.575.600,00	19.575.600,00	0,00	0,00	100,00	97,88	B
205	Pengadaan Kamera Opersional Kegiatan PKHL (UP	URCHASING /	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
206	Pengadaan Kamera Opersional Kegiatan PKHL (UP	URCHASING /	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
207	Pengadaan Kamera Opersional Kegiatan PKHL (UP	URCHASING /	20.000.000,00	15.700.000,00	4.300.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	100,00	78,50	B
208	Pengadaan Kamera Opersional Kegiatan PKHL (UP	URCHASING /	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
209	Pengadaan Kamera Opersional Kegiatan PKHL (UP	URCHASING /	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
210	Pengadaan Alat GPS Kegiatan PKHL (Dinas) (Revisi	URCHASING /	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
211	Belanja Modal Pengadaan Radio Handy Talkie (Din	URCHASING /	45.000.000,00	40.963.500,00	4.036.500,00	40.963.500,00	40.963.500,00	0,00	0,00	100,00	91,03	B
212	Belanja Modal Pengadaan Radio Handy Talkie (UP	URCHASING /	45.000.000,00	40.963.500,00	4.036.500,00	40.963.500,00	40.963.500,00	0,00	0,00	100,00	91,03	B
213	Belanja Modal Pengadaan Radio Handy Talkie (UP	URCHASING /	45.000.000,00	41.338.500,00	3.661.500,00	41.338.500,00	41.338.500,00	0,00	0,00	100,00	91,86	B
214	Belanja Modal Pengadaan Radio Handy Talkie (UP	URCHASING /	45.000.000,00	40.663.500,00	4.336.500,00	40.663.500,00	40.663.500,00	0,00	0,00	100,00	90,36	B
215	Belanja Modal Pengadaan Radio Handy Talkie (UP	URCHASING /	45.000.000,00	40.663.500,00	4.336.500,00	40.663.500,00	40.663.500,00	0,00	0,00	100,00	90,36	B
216	Belanja Modal Pengadaan Radio Handy Talkie (UP	URCHASING /	45.000.000,00	44.235.000,00	765.000,00	44.235.000,00	44.235.000,00	0,00	0,00	100,00	98,30	B
217	Belanja Modal Pengadaan Radio Handy Talkie (UP	URCHASING /	45.000.000,00	40.963.500,00	4.036.500,00	40.963.500,00	40.963.500,00	0,00	0,00	100,00	91,03	B
218	Belanja Modal Pengadaan Radio Handy Talkie (UP	URCHASING /	45.000.000,00	40.963.500,00	4.036.500,00	40.963.500,00	40.963.500,00	0,00	0,00	100,00	91,03	B
219	Belanja Modal Pengadaan Radio Handy Talkie (UP	URCHASING /	45.000.000,00	40.963.500,00	4.036.500,00	40.963.500,00	40.963.500,00	0,00	0,00	100,00	91,03	B
220	Belanja Modal Pengadaan Radio Handy Talkie (UP	URCHASING /	45.000.000,00	40.963.500,00	4.036.500,00	40.963.500,00	40.963.500,00	0,00	0,00	100,00	91,03	B
221	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengolah	URCHASING /	80.000.000,00	74.000.000,00	6.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	100,00	92,50	B
222	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengolah	URCHASING /	80.000.000,00	77.101.280,00	2.898.720,00	77.101.280,00	77.101.280,00	0,00	0,00	100,00	96,38	B
223	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengolah	URCHASING /	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
224	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengolah	URCHASING /	80.000.000,00	78.603.520,00	1.396.480,00	78.603.520,00	78.603.520,00	0,00	0,00	100,00	98,25	B
225	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengolah	URCHASING /	80.000.000,00	77.541.640,00	2.458.360,00	77.541.640,00	77.541.640,00	0,00	0,00	100,00	96,93	B
226	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengolah	URCHASING /	80.000.000,00	77.541.640,00	2.458.360,00	77.541.640,00	77.541.640,00	0,00	0,00	100,00	96,93	B
227	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengolah	URCHASING /	80.000.000,00	75.100.640,00	4.899.360,00	75.100.640,00	75.100.640,00	0,00	0,00	100,00	93,88	B
228	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengolah	URCHASING /	80.000.000,00	75.100.640,00	4.899.360,00	75.100.640,00	75.100.640,00	0,00	0,00	100,00	93,88	B
229	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengolah	URCHASING /	80.000.000,00	75.100.640,00	4.899.360,00	75.100.640,00	75.100.640,00	0,00	0,00	100,00	93,88	B
230	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengolah	URCHASING /	80.000.000,00	74.000.000,00	6.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	100,00	92,50	B
231	Pengadaan Alat GPS Kegiatan PKHL (UPTD Tahura)	URCHASING /	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
232	Pengadaan Alat GPS Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Be	URCHASING /	45.000.000,00	32.691.000,00	12.309.000,00	32.691.000,00	32.691.000,00	0,00	0,00	100,00	72,65	B
233	Pengadaan Alat GPS Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Be	URCHASING /	45.000.000,00	44.850.000,00	150.000,00	44.850.000,00	44.850.000,00	0,00	0,00	100,00	99,67	B
234	Pengadaan Alat GPS Kegiatan PKHL (UPTD KPHP M	URCHASING /	45.000.000,00	44.850.000,00	150.000,00	44.850.000,00	44.850.000,00	0,00	0,00	100,00	99,67	B
235	Pengadaan Alat GPS Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Ke	URCHASING /	45.000.000,00	32.541.000,00	12.459.000,00	32.541.000,00	32.541.000,00	0,00	0,00	100,00	72,31	B
236	Pengadaan Alat GPS Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Sa	URCHASING /	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
237	Pengadaan Alat GPS Kegiatan PKHL (UPTD KPHP D	URCHASING /	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
238	Pengadaan Alat GPS Kegiatan PKHL (UPTD KPHP Be	URCHASING /	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
239	Pengadaan Alat GPS Kegiatan PKHL (UPTD Batu Ay	URCHASING /	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	B
240	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping D	SWAP / NK	5.232.784.100,00	5.232.784.100,00	0,00	108.841.909,28	109.100.620,00	0,83	0,83	2,08	2,08	M
241	RHL Vegetatif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan (	SWAP / NK	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	75.124.500,00	75.119.950,00	45,17	45,17	45,53	45,53	K
242	Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhu	SWAP / NK	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.185.400,00	3.185.000,00	0,00	0,00	53,09	53,08	H
243	Pendampingan, pembentukan dan peningkatan ke	SWAP / NK	734.000.000,00	734.000.000,00	0,00	673.004.600,00	672.951.467,00	75,08	75,07	91,69	91,68	H
244	Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir (Dana Pendamp	SWAP / NK	527.805.000,00	527.805.000,00	0,00	527.805,00	500.000,00	0,10	0,09	0,10	0,09	M
245	Sarana dan Prasarana Wisata Alam di KPH/Tahura,	SWAP / NK	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
246	Pembangunan Pos Resort KPH / Tahura (DAK)	SWAP / NK	102.500.000,00	102.500.000,00	0,00	102.500.000,00	93.045.200,00	66,76	66,76	100,00	90,78	B
247	Pembangunan Pos Resort KPH / Tahura (Dana Pen	SWAP / NK	141.800.000,00	141.800.000,00	0,00	91.461.000,00	91.450.000,00	47,57	47,57	64,50	64,49	H
248	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana (	SWAP / NK	762.300.000,00	762.300.000,00	0,00	762.300.000,00	706.464.440,00	80,20	80,19	100,00	92,68	B
249	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (DBH S	SWAP / NK	929.200.000,00	929.200.000,00	0,00	307.751.040,00	307.653.560,00	14,31	14,30	33,12	33,11	K
250	Pendampingan kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan	SWAP / NK	643.600.000,00	643.600.000,00	0,00	241.414.360,00	241.332.640,00	10,74	10,74	37,51	37,50	K
251	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	SWAP / NK	4.158.766.000,00	4.158.766.000,00	0,00	4.158.766.000,00	3.735.791.643,00	80,42	80,42	100,00	89,83	B
252	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Ke	SWAP / NK	5.936.510.354,00	5.936.510.354,00	0,00	1.568.426.035,53	1.568.088.092,50	9,66	9,66	26,42	26,41	K
253	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SD	SWAP / NK	6.377.900.200,00	6.377.900.200,00	0,00	408.823.402,82	408.783.902,00	1,57	1,57	6,41	6,41	M
254	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (D	SWAP / NK	17.015.523.276,00	17.015.523.276,00	0,00	1.749.195.792,77	1.749.368.003,00	5,26	5,25	10,28	10,28	M
255	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerinta	SWAP / NK	1.393.598.500,00	1.393.598.500,00	0,00	1.393.598.500,00	1.286.591.727,00	84,54	84,54	100,00	92,32	B
256	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Beka	SWAP / NK	2.627.417.920,00	2.627.417.920,00	0,00	232.263.744,13	232.110.200,00	1,85	1,85	8,84	8,83	M
257	Penaksiran Luas Kebakaran & Investigasi Penyebab	SWAP / NK	1.835.850.000,00	1.835.850.000,00	0,00	340.366.590,00	340.227.685,00	3,59	3,58	18,54	18,53	M

258	Patroli Pengamanan (DBH SDA DR)	SWAP / NK	6.999.260.800,00	6.999.260.800,00	0,00	1.643.426.435,84	1.643.567.006,00	10,22	10,22	23,48	23,48	M
259	Penyiapan Perhutanan Sosial (DBH SDA DR)	SWAP / NK	5.477.475.200,00	5.477.475.200,00	0,00	1.088.374.322,24	1.087.974.033,00	6,53	6,52	19,87	19,86	M
260	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan (	SWAP / NK	2.840.378.200,00	2.840.378.200,00	0,00	862.054.783,70	861.951.236,00	15,61	15,61	30,35	30,35	K
261	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (DBH SD/	SWAP / NK	1.005.300.000,00	1.005.300.000,00	0,00	202.366.890,00	202.275.641,00	8,36	8,35	20,13	20,12	M
262	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat (DBI	SWAP / NK	1.815.625.000,00	1.815.625.000,00	0,00	647.633.437,50	647.490.182,00	18,73	18,72	35,67	35,66	K
263	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Setempat (	SWAP / NK	127.200.000,00	127.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
264	Sosialisasi / Kampanye Pencegahan Kebakaran Hut	SWAP / NK	7.371.539.000,00	7.371.539.000,00	0,00	2.941.244.061,00	2.940.810.699,00	17,28	17,28	39,90	39,89	K
265	Penyediaan Bibit (DBH SDA DR)	SWAP / NK	302.720.000,00	302.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
266	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegara	SWAP / NK	1.747.391.200,00	1.747.391.200,00	0,00	382.154.455,44	381.991.300,00	21,02	21,01	21,87	21,86	M
267	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih dan	SWAP / NK	239.800.000,00	239.800.000,00	0,00	239.800.000,00	238.590.000,00	97,96	97,95	100,00	99,50	B
268	Pengedaran Benih dan Bibit (DBH SDA DR)	SWAP / NK	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	10.271.400,00	10.274.500,00	6,47	6,46	6,46	6,46	M
269	Penyediaan Benih (DBH SDA DR)	SWAP / NK	221.200.000,00	221.200.000,00	0,00	76.712.160,00	76.689.000,00	7,09	7,08	34,68	34,67	K
270	Monitoring Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiat	SWAP / NK	494.800.000,00	494.800.000,00	0,00	286.043.880,00	286.042.216,00	43,99	43,98	57,81	57,81	H
271	Metode dan Materi Penyuluhan (DBH SDA DR)	SWAP / NK	336.450.000,00	336.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M
272	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) (DBH S	SWAP / NK	1.876.016.200,00	1.876.016.200,00	0,00	281.402.430,00	281.183.300,00	3,42	3,41	15,00	14,99	M
273	Pelaksanaan RHL (DBH SDA DR)	SWAP / NK	9.660.496.400,00	9.660.496.400,00	0,00	1.367.926.290,24	1.367.980.061,00	3,70	3,69	14,16	14,16	M

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD 2018 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SKPD : DINAS KEHUTANAN	FORMAT C2

No	Nama SKPD	Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)	Realisasi DESEMBER	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Total			
1.	Dinas Kehutanan	114.728.803.000,00	90.627.967.092,00	78.99

KURVA S APBD 2018 - PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SKPD : DINAS KEHUTANAN

FORMAT E

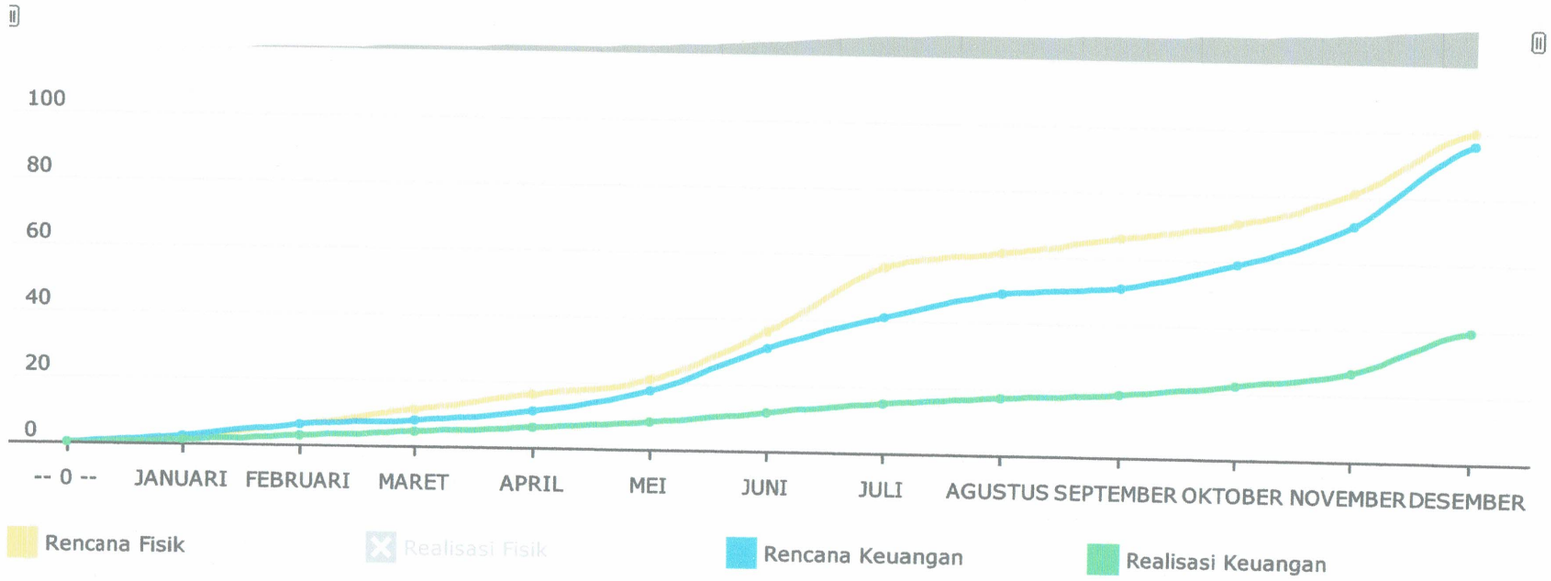

Deskripsi / Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RENC KEUANGAN	2.00	6.00	8.00	11.00	18.00	31.00	41.00	49.00	51.00	59.00	71.00	96.00
REAL KEUANGAN	0.89	2.72	4.50	6.35	8.13	11.52	14.87	16.98	18.84	22.16	26.76	39.68
RENC FISIK	2.00	6.00	11.00	16.00	21.00	36.00	56.00	61.00	66.00	71.00	81.00	100.00
REAL FISIK	1.40	4.25	7.06	9.96	12.75	18.16	23.30	26.64	29.48	35.01	42.33	62.34

Note :
(*) Rencana Keuangan maupun Fisik pada tabel diatas adalah Target Provinsi

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

(H. Amrullah)
NIP. 19611214 198703 1 010

DINAS KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, Kode Pos 75124
Telp. (0541) 741963; 741803; 741807 Fax. (0541) 736003; 741803
Email: dishut.kaltim@gmail.com; renram.dishut@gmail.com